

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Tes Uji Reliabilitas

Sebelum memasuki hasil proses penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan uji reliabilitas data untuk menguji validitas alat ukur yang telah dijabarkan sebelumnya, untuk mengetahui sejauh mana alat ukur dapat dipercaya. Hasil uji reliabilitas yang diperoleh dari perhitungan dengan menggunakan rumus Holsti yang mana derajat kesamaan harus mencapai 70% atau 0,7 adalah:

Tabel 5.1
Uji Reliabilitas Data Intercoder Unit Analisis

Kode	Unit Analisis	N1	N2	M
1	Faktualitas	36	36	36
2	Akurasi	36	36	32
3	Kelengkapan Isi	36	36	30
4	Relevan	36	36	36
5	Akses Proporsional	36	36	30
6	Non-Evaluatif	36	36	32
7	Non-Sensasional	36	36	36
Total		252	252	232

Sumber: Data Penelitian

M = Jumlah *coding* yang sama disetujui oleh masing-masing coder

N1 = Jumlah *coding* yang dibuat oleh coder 1

N2 = Jumlah *coding* yang dibuat oleh coder 2

Hasil uji reliabilitas

$$CR = \frac{2M}{N_1 + N_2} = \frac{2(232)}{252 + 252} = \frac{464}{504} = 0,92$$

Uji Reliabilitas antar coder ini menggunakan formula Holsti dengan angka reliabilitas minimum yang ditoleransi adalah 0,7 atau 70%. Pada hasil penelitian ini diperoleh angka reliabilitas 0,91 yang menunjukkan bahwa semua unit analisis dan alat ukur reliabel.

B. Hasil Penelitian

Pada bab laporan penelitian ini, penulis akan menjelaskan hasil dari objek penelitian, yaitu "Analisis Objektivitas Pemberitaan Tambang Batubara di Media Online Mongabay.co.id". Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus Eriyanto, jumlah sampel yang didapat adalah sebanyak 36 item berita yang keseluruhannya diteliti oleh penulis.

Setelah mendapatkan jumlah sampel yang akan diteliti, proses selanjutnya adalah melakukan analisis isi pada sampel berita, dan telah dijelaskan pada bab sebelumnya penulis menggunakan metode analisis isi deskriptif kuantitatif unit analisis sampel (*sampling*). Penulis akan memaparkan hasil penelitian yang didapatkan dari pengisian lembar *coding* sebelumnya. Pemaparan hasil temuan kemudian akan dipaparkan sesuai dengan urutan klasifikasi didalam lembar *coding*. Data-data yang sudah didapatkan akan disajikan menggunakan tabel frekuensi agar memudahkan pembaca memahami hasil penelitian. Dalam proses ini penulis melakukan pengelompokan terhadap keseluruhan sampel berita berdasarkan kategori objektivitas dari Westerthal, sesuai dengan ketetapan sebelumnya.

Westerthal membagi Objektivitas kedalam dua dimensi besar. Pertama, dimensi Faktualitas. Dimensi ini berkaitan dengan kualitas informasi dari suatu berita. Dimensi ini dapat diturunkan ke dalam dua sub dimensi. *Pertama*, benar (*truth*) yakni sejauh mana berita menyajikan informasi yang benar. Subdimensi ini dapat diturunkan ke dalam subdimensi yang lebih kecil lagi, yakni faktualitas (pemisahan

fakta dari opini, komentar, interpretasi); akurasi (kesesuaian dengan fakta atau peristiwa yang sebenarnya), dan kelengkapan isi (isi berita memenuhi semua unsur 5W+1H). *Kedua*, relevan. Berita yang relevan dapat diketahui dari nilai berita yang terkandung didalamnya). Sementara itu dimensi imparsialitas berkaitan dengan apakah berita telah disajikan secara adil semua sisi dari peristiwa dan perdebatan yang diberitakan. Dimensi ini dapat diturunkan kedalam dua Subdimensi. *Pertama*, berimbang (balance). Berita yang berimbang adalah berita yang menampilkan semua sisi tidak menghilangkan dan menyeleksi sisi tertentu untuk diberitakan (akses proporsional). *Kedua*, netral. Berita menyampaikan peristiwa dan fakta apa adanya, tidak memihak pada sisi dari peristiwa. Subdimensi ini juga dapat diturunkan ke dalam sub yang lebih kecil, yakni non-evaluatif (tidak adanya pencampuran fakta dan opini wartawan) dan non-sensasional (berita tidak melebih-lebihkan fakta atau dramatisasi dan terdapat kesesuaian judul dan isi berita).

Selanjutnya dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan hasil penelitian dengan tabel distribusi frekuensi dan persentase. Setelah menganalisis data secara kuantitatif didasarkan pada frekuensi dan persentase. Hasil dari persentase telah didapatkan dengan analisis jumlah dari data hasil tersebut. Dari jumlah frekuensi dan persentase yang telah didapatkan, kemudian peneliti menyimpulkan makna setiap alternatif berdasarkan perhitungan bergradasi atau berperingkat 1 sampai dengan 5 yang diukur dengan menggunakan kategori yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. "Sangat objektif" apabila kesesuaian antara berita dengan isi mempunyai nilai dari 80% sampai dengan 100% (jika ditetapkan).
2. "Objektif" apabila kesesuaian antara berita dengan isi mempunyai nilai dari 60% sampai dengan 79% (jika ditetapkan).
3. "Cukup objektif" apabila kesesuaian antara berita dengan isi mempunyai nilai dari 40% sampai dengan 59% (jika ditetapkan).
4. "Kurang objektif" apabila kesesuaian antara berita dengan isi mempunyai nilai dari 20% sampai dengan 39% (jika ditetapkan).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

"Tidak objektif" apabila kesesuaian antara berita dengan isi mempunyai nilai dari 0% sampai dengan 19% (jika ditetapkan).



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Table 5.2
Coding Sheet

Analisis Objektivitas Pemberitaan Tambang Batubara di Media Online Mongabay.co.id

No	Judul	Faktualitas		Akurasi	Kelengkapan Isi						Relevan	Akses Proporsional		Non-Evaluatif	Non-Sessasional
		Sosiologis	Psikologis		What	Where	When	Why	Who	How		1 Sisi	2 Sisi		
1	Sudah 30 Korban Lubang Tambang Batubara di Kalimantan Merenggut Nyawa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
2	Aturan Baku Mutu Emisi, 'Karpas Merah' PLTU Batubara, Cemari Udara	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1
3	Nelayan dan Petani di Langkat Serukan Setop Energi Batubara, Alihkan ke Terbarukan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1

4	Nasib Pulau-pulau Kecil dalam Cengkeraman Tambang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
5	Aturan Baku Mutu Air Limbah PLTU Batubara Bisa Bahaya ke Laut	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
6	Batubara Mencurigakan, LSM: Pemerintah Harus Teusur	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1
7	Warga Sekitar PLTU Batubara Ngadu ke Posko Kampanye Jokowi dan Prabowo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
8	Suarakan Daye Rusak Tambang, Koalisi Protes di Kementerian Energi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
9	Dugaan Suap Izin Tambang, KPK: Bupati Kotawaringin Timur Tersangka	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1

10	Pantai wisata di Lubang Tambang belum sepenuhnya bersih dari tumpahan Batubara	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
11	Korban jiwa di Lubang Tambang, Masalah Besar Ibu Kota Baru Indonesia	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
12	Teror Tambang Batubara Hantui Warga Mandiangin	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
13	Kala Warga Wawonii Tolak Tambang Terjerat Hukum, KKP Temukan Pelanggaran Perusahaan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
14	Habis Banjir Terbitlah Petisi Tutup Tambang di Bengkulu	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
15	Berelasi Bisis Batubara, Koalisi Desak Bawaslu Ungkap Dana Kampanye Cawapres	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1

16	Dilarang Jalan Darat, Sungai Musi Terancam Angkutan Batubara?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
17	Pemerintah Aceh Diminta Lindungi Hutan dari Aktivitas Pertambangan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
18	Kajian ini Ungkap Energi Bersih Lebih Hemat daripada PLTU	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
19	Sexy Killers : Masyarakat Sebagai Anak Tiri Pertambangan? [2]	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
20	Sexy Killer, Ketika Industri Batubara Hancurkan Lingkungan dan Ruang Hidup Warga	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
21	Peraturan Zonasi Pesisir Hadir untuk Pinggirkan Masyarakat Pesisir	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1

22	Menembus Jantung Hutan Harapan yang Terancam Jalan Tambang Batubara (Bagian 1)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
23	Koalisi Tolak Jalan Angkut Batubara Lewati Hutan Harapan (Bagian 2)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
24	Pemerintah Aceh Tidak Lagi Perpanjang Moratorium Tambang, Mengapa?	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1
25	Belt and Road Initiative, Walhi: Syarat Rancangan hanya Bagus di Kertas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
26	Bongkar Muat Batubara PLTU Pangkalan Susu Potensi Cemar Laut, Berikat Foto dan Video	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
27	Kartu Pos dari Sumatera Tantang para Capres serius Kembangkan Energi Terbarukan	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1

28	Kajian Sebab-Musabab Bukota Negara Banyak di Koneksi Urutan Siapa?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
29	Renggut yyyw lain, sudah 35 korban dilubang Tamban Batuany yang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0
30	Gubernur Sultra Cabut 9 Izin Tambang di Wawonii Baka 6 Lainnya	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1
31	Demo Tuntut Pemerintah Sultra Cabut Izin Tamban d Wawonii, Warga Alami Kekerasan Aparat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
32	Cerita Warga Mestanti Wawonii Terbebas dari Pertambangan	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1
33	Soal Menteri Tambang, Gubernur NTT Ditagih Janji Utamakan Pariwisata dan Pertanian	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1

34	Politik dan Melekat yang Terabaikan	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1
35	Tambahan Batu Bara Ini Ancam Hutan Desa dan Dekat Suka Ramang Baling	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
36	Organisasi Lingkungan Desak Jepang Setop Biayai Berencana Batubara	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
Jumlah		35	36	34	36	5	30	3	3	3	3	3	33	34	35

Berikut Penjabaran Hasil Penelitian Objektivitas Pemberitaan Tambang Batubara Pada Media Online Mongabay.co.id per-indikator, yaitu:

a. Dimensi Faktualitas

Faktualitas

Faktualitas dilihat dengan pemisahan fakta dari opini, komentar, interpretasi pada suatu berita. Faktualitas terbagi dari dua yaitu fakta sosiologis dan fakta psikologis. Berikut sajian hasil analisis faktualitas berita dengan penjabaran tabel frekuensi dibawah ini:

Tabel 5.3
Tabel Frekuensi Faktualitas

No	Faktualitas	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Faktual	36	100%
2	Tidak Faktual	0	0%
Total		36	100%

Sumber: Data Penelitian

$$p = \frac{f}{N} \times 100 \%$$

a. Faktual

$$p = \frac{36}{36} \times 100 \%$$

b. Tidak Faktual

$$p = \frac{0}{36} \times 0 \%$$

Keterangan:

P = Persentase

f = frekuensi

N = Jumlah Nilai

100% = Ketetapan Rumus

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui Faktualitas pada pemberitaan Tambang Batubara di Media Online Mongabay.co.id adalah 100% dengan jumlah 36 berita. Fakta tersebut terbagi dari dua indikator yakni 35 fakta sosiologis dan 36 fakta psikologis. Artinya semua berita yang dianalisis memnuhi unsur factual dengan persentase 100%. Maka dapat disimpulkan bahwa indikator faktualitas pada pemberitaan ini adalah sangat objektif.

Contoh kutipan berita berdasarkan fakta sosiologis yang bersumber pada peristiwa nyata tanpa memuat unsur opini dan diamati secara langsung adalah pada berita dengan judul “Cerita Warga Menanti Wawonii Terbebas dari Pertambangan”:

“Ribuan warga yang mendiami pulau itu, berbondong-bondong datang ke Kota Kendari, ibukota Sultra untuk demo di Kantor Gubernur Sultra, Jalan Halu Oleo, Poasia.

Ada empat kali demo warga. Mereka menuntut, pulau kecil ini terbebas dari pertambangan. Mereka mendesak Gubernur Sultra, H. Ali Mazi, mencabut 15 izin usaha pertambangan (IUP).

Gubernur Sultra, langsung menghentikan operasi perusahaan yang menguasai izin usaha pertambangan di sana. Ali Mazi mengeluarkan surat bernomor 540/B52/ESDM Sultra, tentang penghentian sementara seluruh operasi produksi 15 IUP di Konkep. Wakilnya, Lukman Abunawas menyatakan, siap mencabut 15 IUP di Wawonii.”

Dalam kutipan diatas, fakta yang diperoleh secara langsung dan tidak memuat unsur opini pihak kedua. Berita tersebut menggambarkan warga yang mendiami pulau Wawonii berbondong-bondong datang ke Kota Kendari menuntut pulau Wanonii terbebas dari pertambangan, dan mendesak Gubernur Sultra, H. Ali Mazi, mencabut 15 izin usaha pertambangan (IUP). Pada berita tersebut wartawan mendapatkan fakta secara langsung dan termasuk fakta sosiologis yang berdasarkan peristiwa nyata.

Contoh kutipan berita berdasarkan fakta psikologis yang bersumber pada opini seseorang, lembaga, maupun institusi terhadap fakta dalam bentuk pernyataan, penilaian dan pendapat adalah pada berita dengan judul “Sudah 34 Korban, Lubang Tambang Batubara di Kaltim Terus Merenggut Nyawa”:

Bertepatan peringatan Hari Anti Tambang, di Kalimantan Timur [Kaltim] anak usia 10 tahun meninggal di lubang bekas galian tambang [29/5/2019]. Korban adalah Natasya Aprilia Dewi [Nad], putri pasangan Sanadi dan Purwanti. Nad merupakan siswi kelas IV SD Islam Jamiatul Mutaqin, Samarinda.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Menurut catatan Jaringan Advokasi Tambang [Jatam] Kalimantan Timur, kronologi kematian Nad bermula saat korban bermain di sekitar lubang tambang menganga seluas 2,31 hektar, tanpa penjaga. Dinamisator Jatam Kaltim, Pradarma Rupang mengatakan, korban tewas di lubang bekas tambang PT. Insani Bara Perkasa [IBP]. Dari keterangan saksi mata, korban terperosok tenggelam. Nad sempat mendapatkan perawatan di RSUD IA Moeis, namun dinyatakan meninggal pada 17.30 Wita.

“Nad adalah korban ke-34 selama delapan tahun terakhir. Kalimantan Timur bukan Provinsi ramah anak. Pemerintah abai akan hal ini,” katanya.

Dalam kutipan berita diatas, terlihat fakta yang disampaikan berdasarkan pernyataan dari narasumber, narasumber menyatakan korban tewas di lubang bekas tambang PT. Insani Bara Perkasa [IBP, korban terperosok tenggelam.korban yang bernama Nad sempat mendapatkan perawatan di RSUD IA Moeis, namun dinyatakan meninggal pada 17.30 Wita. Hal ini merupakan interpretasi subjektif berupa pernyataan yang bersifat fakta sehingga termasuk salah satu fakta psikologis.

2. Akurasi

Akurasi merupakan kesesuaian dengan fakta atau peristiwa yang sebenarnya, yang dapat diketahui dengan ada tidaknya cek dan ricek yang dilakukan wartawan dalam menyajikan suatu berita. Berikut sajian hasil analisis akurasi berita dengan penjabaran tabel frekuensi dibawah ini:

Tabel 5.4
Tabel Frekuensi Akurasi

No	Akurasi	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Akurat	34	94.44 %
2	Tidak Akurat	2	5.56%
Total			100%

Sumber: Data Penelitian

$$p = \frac{f}{N} \times 100 \%$$

a. Akurat

$$p = \frac{34}{36} \times 94.44 \%$$

b. Tidak Akurat

$$p = \frac{2}{36} \times 5.56 \%$$

Keterangan:

P	= Persentase
f	= frekuensi
N	= Jumlah Nilai
100%	= Ketetapan Rumus

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui akurasi pada berita Tambang Batubara di Media Online Mongabay.co.id adalah 94.44% dengan jumlah 34 berita. Sementara itu 2 berita tidak akurat dengan persentase 5.56%. maka dapat disimpulkan bahwa indikator akurasi pada pemberitaan ini sangat objektif.

Contoh kutipan berita yang memiliki kesesuaian berita dengan fakta yang terjadi adalah pada berita “Pantai Wisata Ini Belum Sepenuhnya Bersih dari Tumpahan Batubara”:

Zaki Mulia, pemuda asal Kecamatan Lhoknga yang tergabung dalam Lhoknga Surf Team, mengatakan, saat mereka surfing dan menyelam di pantai, masih didapati tumpukan batubara. Pemandangan ini sangat tidak menguntungkan, sebab wisatawan lokal maupun mancanegara komplain dengan kondisi tersebut.

“Kami dari pegiat selancar sudah mengingatkan semua pihak agar tumpahan batubara ditangani serius. Terlebih, akhir November 2019, di pantai Lhoknga dilaksanakan Aceh Surfing Championship 2019. Memang, saat itu batubara dibersihkan, tapi tidak tuntas,” terangnya baru-baru ini.

Zaki menambahkan, Pemerintah Aceh Besar juga sudah beberapa kali meminta PT. Solusi Bangun Andalas menyelesaikan masalah itu. “Namun, kami juga pernah mendengar alasan perusahaan, tumpah adalah tanggung jawab kapal pengangkut,” ungkapnya.

Abdul Muchti, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten [DPRK] Aceh Besar yang pernah menjadi Ketua Perwakilan Masyarakat Lhoknga-Leupung, saat mempersoalkan keberadaan pabrik semen tersebut di Kecamatan Lhoknga dan Leupung pada 2008 mengatakan, PT. Solusi Bangun Andalas dan perusahaan pemilik tongkang yang terdampar itu harus terbuka kepada masyarakat dan pemerintah. Hingga saat ini, publik tidak tahu jumlah batubara tumpah yang telah diangkut atau dipindahkan.

“Pemerintah juga harus bertindak tegas terhadap masalah ini,” sebutnya.

Menurut Muchti, Pantai Lhoknga dan Lampuuk yang berada di Kecamatan Lhoknga, merupakan objek wisata andalan Kabupaten Aceh Besar. “Banyak masyarakat yang menggantungkan hidup dari sini.”

Bukti sisa tumpahan batubara dimakan ikan ditunjukkan Muhammad Yulfan, pemuda Kecamatan Lhoknga yang juga pernah bertugas sebagai juru bicara Perwakilan Masyarakat Lhoknga-Leupung. Dia memposting video ikan yang dibedah dan ditemukan butiran hitam yang diduga batubara ke media sosial. Ikan buntal tersebut ditemukan mati oleh masyarakat Lhoknga, di bibir pantai.

“Saat dibedah, ada butiran batubara.”

Yulfan yang bekerja sebagai advokat mengatakan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan [DLHK] Aceh harus segera mengatasi masalah ini.

“Pemerintah harus mendesak perusahaan untuk memikirkan dan mencari solusi kerusakan ekosistem laut. Bukan hanya memindahkan batubara dari laut ke darat,” ungkapnya.

Direktur Eksekutif Walhi Aceh, Muhammad Nur menyebutkan, tumpahnya batubara di pantai Aceh ini bukan kejadian pertama. Pada 2016, batubara juga mengotori Pantai Lhoknga saat hendak dipasok ke perusahaan semen.

“Tidak ada yang diminta pertanggungjawaban. Padahal, UU 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup [PPLH] telah mengaturnya. Kami minta, dinas terkait yang menangani masalah ini segera menyiapkan gugatan ke perusahaan dan kontraktornya,” jelasnya.

Manajemen PT. Solusi Bangun Andalas [PT. SBA] dalam pernyataan kepada media mengatakan, tahap pertama penanganan tumpahan batubara di Pantai Lhoknga telah dilakukan. “Pembersihan tahap pertama dilakukan di bibir pantai hingga kedalam dua meter. Pembersihan selanjutnya mulai disosialisasikan 14 November 2019,” terang Communications & Event Specialist PT. SBA, Faraby Azwany.

Faraby menjelaskan, pembersihan batubara itu melibatkan masyarakat dan lembaga adat laut. Selain itu, pada Juni 2019 tim yang terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Kementerian LHK, Protection and Indemnity [P&I], PT. Solusi Bangun Andalas, serta komite penanggulangan tumpahan batubara juga telah melakukan survei.

“Bentuk atau cara pembersihan tahap berikutnya juga sudah dievaluasi dan pembersihan akan dilakukan,” ujarnya.

Di penghujung Juli 2018, sebanyak 7 ribu ton batubara yang diangkut kapal tongkang TB Marina berceceran di Pantai Lhoknga setelah dihantam badai. Emas hitam yang diangkut dari Pelembang itu hendak dipasok untuk kebutuhan pembangkit listrik pabrik semen PT. Solusi Bangun Andalas [PT.SBA].

PT. SBA yang sebelumnya bernama PT. Lafarge Cement Indonesia [LCI] merupakan perusahaan yang telah diakuisisi oleh Badan Usaha Milik Negara [BUMN] PT. Semen Indonesia Group [Tbk] dari PT. Holcim Indonesia pada Februari 2019.

Moratorium

Terpisah, terkait kondisi tambang di Aceh saat ini, Koordinator Gerakan Anti Korupsi [GeRAK] Aceh, Askhalani menyatakan, Pemerintah Aceh telah mengakhiri 98 Izin Usaha Pertambangan [IUP] eksplorasi dan operasi produksi mineral logam dan batubara.

Keputusan pengakhiran IUP tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Aceh Nomor 540/1436/2018 tertanggal 27 Desember 2018. Pemerintah pusat juga diminta mengikuti langkah ini dengan tidak menerbitkan izin pertambangan di Aceh.

“Moratorium tambang harus diperpanjang, karena masih banyak persoalan sumber daya alam yang belum ditertibkan,” ujarnya.

Askhalani mengatakan, banyak alasan yang bisa dipakai untuk kembali memberlakukan moratorium tambang. Misal, belum ada penyusunan wilayah izin usaha pertambangan [WIUP] dan sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh.

Potensi kerugian negara akibat tunggakan piutang penerimaan negara bukan pajak [PNBP] juga belum tertagih yang jumlahnya mencapai Rp40 miliar. “Belum lagi sebagian besar areal pertambangan berada di dalam hutan,” jelasnya.

Masalah lain, menurut dia, adalah lemahnya pengawasan reklamasi dan pascatambang. Banyaknya IUP di kawasan hutan lindung harus menjadi tolok ukur memperpanjang jeda tambang ini. “IUP yang sudah clean and clear [CnC] juga, masih menimbulkan permasalahan serta konflik dengan masyarakat yang belum tuntas,” tandasnya.

Berdasarkan kutipan berita diatas, menunjukkan bahwa wartawan melakukan cek dan ricek terhadap fakta dengan mencantumkan nama narasumber serta jabatannya, tempat, dan waktu yang jelas, maupun informasi lainnya yang ditulis dengan benar tanpa adanya kesalahan.

3. Kelengkapan Isi

Berita dikatakan lengkap apabila isi berita memenuhi semua unsur 5W=1H tanpa terkecuali. Berikut sajian hasil analisis kelengkapan isi berita dengan penjabaran tabel frekuensi dibawah ini:

Tabel 5.5
Tabel Frekuensi Kelengkapan Isi

No	Faktualitas	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Lengkap	29	80.56%

2	Tidak Lengkap	7	19.44%
Total		36	100%

Sumber: Data Penelitian

$$p = \frac{f}{N} \times 100 \%$$

a. Lengkap

$$p = \frac{29}{36} \times 80.56 \%$$

c. Tidak Lengkap

$$p = \frac{7}{36} \times 19.44 \%$$

Keterangan:

P = Persentase

f = frekuensi

N = Jumlah Nilai

100% = Ketetapan Rumus

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui kelengkapan isi pada berita Tambang Batubara di media Online Mongabay.co.id adalah 80.56% dengan jumlah 29 berita. Sementara itu 7 berita tidak memenuhi unsur kelengkapan isi berita dengan persentase 19.44%. maka dapat disimpulkan bahwa indikator lengkap pada pemberitaan ini adalah sangat objektif.

Contoh kutipan berita yang memiliki unsur kelengkapan isi adalah pada berita dengan judul “Organisasi Lingkungan Desak Jepang Setop Biayai Energi Batubara”:

Puluhan orang berkumpul di depan Gedung Sinarmas Plaza di Kawasan Thamrin Jakarta, Jumat (21/6/19). Mereka membentangkan berbagai spanduk bertulisan penolakan terhadap investor Jepang mendanai berbagai proyek batubara di Indonesia.

Gedung tempat mereka aksi itu kantor perusahaan asal Jepang, Marubeni. Perusahaan ini dinilai banyak memberikan pendanaan proyek energi berbasis batubara. Selain Marubeni, sasaran aksi juga Sumitomo dan Mizuho Bank.

Aksi organisasi lingkungan ini tak hanya di Jakarta, Indonesia, juga di Philipina dan Jepang, dalam waktu bersamaan. Mereka gelar aksi menjelang pertemuan G20 pada 28-29 Juni di Jepang. Hajatan negara-negara dengan

tingkat pertumbuhan ekonomi terbesar di dunia itu dianggap selalu ditunggangi korporasi yang mengeruk untung dari pertumbuhan ekonomi yang menghancurkan ruang hidup, merusak daya dukung lingkungan, melahirkan ketimpangan dan membiarkan pelanggaran hak asasi manusia.

Melky Nahar, dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mengatakan, masyarakat sipil resah melihat sikap Pemerintah Indonesia yang memenuhi kebutuhan energi, masih bergantung batubara.

Selain itu, katanya, negara-negara maju seperti Jepang, begitu banyak memberikan duit ke Indonesia buat kepentingan tambang batubara maupun pembangkitnya. "Investasi-investasi seperti ini sebetulnya kita tolak. Indonesia memiliki energi lain, lebih ramah lingkungan daripada ketergantungan terhadap batubara," katanya.

Industri batubara, katanya, memperparah perubahan iklim, berkontribusi banyak kepada praktik-praktik perampasan tanah, pencemaran air, kerusakan hutan, kriminalisasi, pelanggaran HAM dan lain-lain.

Melky tak menampik, pendanaan investasi Jepang untuk energi terbarukan ada, tetapi masih dominan sektor batubara. Kalau pemerintah dan perusahaan Jepang mau berinvestasi di Indonesia, kata Melky, seharusnya menysar pengembangan energi terbarukan.

"Sudah ada kesepakatan Internasional bahwa ada perubahan iklim, sepakat mengurangi investasi batubara dan PLTU. Faktanya, enggak, justru banyak berinvestasi batubara di Indonesia."

Pada September 2018, Marubeni sebenarnya sudah mengumumkan kepada publik tak lagi memulai proyek-proyek pembangkit listrik tenaga barubara baru.

Toni Irfan Herlambang, Aktivis 350.org Indonesia juga mendesak perusahaan-perusahaan Jepang benar-benar bertanggungjawab dengan tak lagi investasi energi kotor di Indonesia.

"Kami menuntut mereka menarik semua pendanaan dari proyek kotor di Indonesia. Pertemuan G20 ini momentum penting bagi Jepang menunjukkan komitmen mereka serius mendorong pengembangan energi terbarukan."

Indonesia, katanya, salah satu negara yang merasakan dampak perubahan iklim parah. Kalau tetap menerima pendanaan industri berbasis batubara dari Jepang, katanya, akan mendorong krisis iklim.

"Banyak sekali bencana alam, suhu ekstrim, dan bencana-bencana lain di Indonesia. Dengan proyek energi kotor, akan makin menambah banyak lagi bencana."

Muhammad Reza, dari KRuHA mengatakan, dalam konteks pertemuan G20, mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi proses bertukar dengan ekonomi kotor seperti batubara. Hal ini, katanya, akan melahirkan ketimpangan, mengusir banyak orang dari ruang hidup, meracuni air dan mengancam kehidupan warga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dwi Sawung, Manajer Kampanye Energi dan Perkotaan Walhi Eksekutif Nasional juga bicara. Dia bilang, Marubeni merupakan perusahaan yang banyak membangun energi kotor di Indonesia, antara lain PLTU Cirebon dan Tarahan.

“Di Cirebon itu ada kasus korupsi saat KPK penangkapan Bupati Sunjaya Purwadi Sastra. Awalnya, kasus suap jabatan. Ketika penggeledahan, ternyata ditemukan uang jauh lebih besar dibandingkan suap jabatan dari PLTU Cirebon.”

Kondisi ini, menunjukkan proyek PLTU ini tak hanya kotor, tetapi lekat dengan korupsi. Saat ini, Sanjaya sudah dihukum untuk kasus suap jabatan, persoalan suap dari PLTU belum lanjut.

Dia juga sebutkan, korupsi pembangunan PLTU Riau yang menjerat mantan anggota dewan Eni Maulani Saragih, mantan Menteri Sosial Idrus Marham dan Direktur Utama PLN Sofyan Basir.

“Mereka harusnya tahu juga dana mereka lari untuk kasus suap.”

Berita diatas dikatakan lengkap karena isi berita telah memenuhi unsur 5W + 1H. untuk gambaran lebih rinci, peneliti akan menjabarkan keseluruhan 5W+ 1H:

- a) What : Penolakan terhadap investor Jepang mendanai berbagai Proyek Batubara di Indonesia
- b) Where : Di Depan Gedung Sinarmas Plaza di Kawasan Thamrin Jakarta
- c) Who : Organisasi Lingkungan
- d) Why : Masyarakat sipil resah melihat sikap Pemerintah Indonesia yang memenuhi kebutuhan energi, masih bergantung batubara, Selain itu, negara-negara maju seperti Jepang, begitu banyak memberikan duit ke Indonesia buat kepentingan Tambang Batubara maupun pembangkit “
- e) When : Jum’at (21/6/2019)
- f) How : Organisasi Lingkungan menuntut mereka menarik semua pendanaan dari proyek kotor di Indonesia. Pertemuan G20 itu, menjadikan momentum penting bagi Jepang menunjukkan komitmen mereka serius mendorong pengembangan energi terbarukan.

Indonesia, katanya, salah satu negara yang merasakan dampak perubahan iklim parah. Kalau tetap menerima pendanaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

industri berbasis batubara dari Jepang, katanya, akan mendorong krisis iklim.

Banyak sekali terjadi bencana alam, suhu ekstrim, dan bencana-bencana lain di Indonesia. Dengan proyek energi kotor, akan makin menmabah lagi bencana. Kata Toni Irfan Herlambang, Aktivis 350.org Indonesia.

4. Relevansi

Berita yang relevan dapat diketahui dari nilai berita yang terkandung didalamnya. Berikut sajian hasil analisis relevan pada berita dengan penjabaran tabel frekuensi dibawah ini:

Tabel 5.6
Tabel Frekuensi Relevansi

No	Relevansi	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Relevan	36	100%
2	Tidak Relevan	0	0%
Total		36	100%

Sumber: Data Penelitian

$$p = \frac{f}{N} \times 100 \%$$

a. Relevan

$$p = \frac{36}{36} \times 100 \%$$

b. Tidak Relevan

$$p = \frac{0}{36} \times 0 \%$$

Keterangan:

P = Persentase

f = frekuensi

N = Jumlah Nilai

100% = Ketetapan Rumus

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui relevansi pada berita Tambang Batubara di Media Online Mongabay.co.id adalah 100% dengan jumlah berita 36 berita. Artinya semua berita yang dianalisis memenuhi unsur relevansi dengan persentase 100%. Maka dapat disimpulkan bahwa indikator relevansi pada pemberitaan ini adalah sangat objektif.

Contoh kutipan berita yang memiliki unsur relevansi adalah pada berita dengan judul “Demo Tuntut Pemerintah Sultra Cabut Izin Tambang di Wawonii, Warga Alami Kekerasan Aparat”:

Aksi warga menolak pertambangan di Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara, pada Rabu (6/3/19), berakhir panas. Aparat keamanan dari Satpol PP dan polisi menembakkan gas air mata bahkan, sampai terjadi pemukulan terhadap pendemo. Beberapa orang dilarikan ke rumah sakit.

Wawonii, merupakan pulau kecil di Sultra, seluas 715 kilometer persegi, tetapi dikerubuti belasan izin tambang. Demonstrasi warga mendesak Gubernur Sultra, mencabut sekitar 15 izin tambang di Wawonii, digelar di Kantor Gubernur, sudah dua kali dalam Maret ini.

Aksi pertama, Senin (4/3/19), sekitar 300 warga mendatangi kantor gubernur, didampingi organisasi mahasiswa seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Kendari, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan LMND Kendari. Mereka bersatu dalam elemen bernama Front Rakyat Sultra Bela Wawonii.

Dalam aksi pertama, warga dan mahasiswa terlibat saling dorong dengan polisi—Polda Sultra dan Polres Kendari—dan Satpol PP. Massa mencoba mendobrak barikade keamanan guna menemui Gubernur Sultra, H. Ali Masi. Tindakan saling dorong tak berlangsung lama, massa memilih mundur.

Di depan gerbang Kantor Gubernur Sultra, mahasiswa menggelar teatrikal dan kubur diri. Dalam teatrikal mereka menggambarkan tanah Wawonii, yang dulu penuh nyiur nan rimbun, seketika berubah. Kelapa tumbang dan tanah dikeruk investor tambang. Warga menjerit dan menangis menyaksikan ini.

Pada Rabu (6/3/19), Front Rakyat Sultra Bela Wawonii, kembali menggelar demo. Massa lebih banyak. Pada demo kedua ini, warga dan mahasiswa tak ada jeda menggelar long march dari Kampus Universitas Halu Oleo hingga ke depan kantor gubernur. Sampai di kantor gubernur, massa mendorong barikade polisi dan Satpol PP.

Aparat berjatuhan menghalau warga. Massa akhirnya berhasil masuk ke halaman Kantor Gubernur Sultra. Tak mau kalah dari warga, seorang anggota Polres Kendari menembakkan gas air mata tepat di tengah-tengah demonstran. Bukan cuma sekali, ledakan gas air mata terdengar puluhan kali.

Kepulan asap dari gas air mata, membuat warga dan mahasiswa berhamburan. Saya juga tak luput semburan gas air mata. Begitu juga ibu-ibu berumur 50-60 tahun yang ikut aksi. Mereka duduk tersimpuh karena mata perih.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada yang pingsan, dilarikan ke rumah sakit terdekat. Ada juga berlari tak tahu arah, mata tak bisa dibuka karena perih. Warga kalang kabut.

Ricuh terjadi dua kali. Pertama, depan gerbang kantor gubernur, kedua, usai pertemuan antara Kadis Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sultra, Andi Azis, dengan warga.

Tercatat, ada 11 orang luka, baik warga maupun polisi. Kaca kantor gubernur pecah, pelayanan publik pun juga lumpuh total. PNS dan honorer sibuk menyaksikan warga dan aparat bentrok.

“Kawan kami dipukuli Pol PP dan Polisi seperti binatang. Walau sudah terjatuh masih juga dipukuli menggunakan rotan,” kata Mando, kordinator lapangan.

Mando mengatakan, aksi mereka adalah aksi damai. Warga hanya ingin bertemu Gubernur, H. Ali Mazi, agar mencabut 15 IUP di Wawonii. Mando juga kecewa atas sikap Wakil Gubernur, Lukman Abunawas.

Walaupun warga sudah dipukuli dan ditembak gas air mata, Lukman, tidak mau keluar dari ruang kerjanya.

“Dia hanya mengutus Pak Andi Azis. Padahal, dia ada di ruang kerja. Ini kami tahu dari Pak Andi Azis sendiri,” katanya.

Dia tahu alasan Lukman Abunawas, tak mau menemui massa, karena takut. Kelimabelas izin tambang ini, terbit saat Lukman menjadi Bupati Konawe pada 2007-2013.

Respon Pemerintah Sultra

Massa ditemui Kadis ESDM, Andi Azis. Dia menyampaikan, enam poin. Pertama, katanya, di Wawonii ada 18 IUP. Rinciannya, tujuh IUP mineral logam dan batuan dan 11 IUP non mineral logam dan batuan.

Kedua, soal koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Ketiga, Pemprov akan mendatangi kementerian baik ESDM dan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Keempat, soal menyiapkan langkah apabila ada gugatan dari perusahaan. Kelima, akan menelaah risiko pencabutan IUP. Keenam, akan menurunkan tim di lokasi melihat dan mendalami bagaimana duduk persoalan.

Dia berjanji, membahas aspirasi pendemo, dalam rapat internal yang dipimpin langsung Gubernur Sultra. “Ini kami akan tindaklanjuti dan koordinasi dengan lembaga-lembaga baik daerah maupun pusat. Banyak yang harus kami koordinasikan dengan para lembaga-lembaga berwenang,” katanya.

Masih di rumah sakit

Dari ricuh demo tolak tambang warga Wawonii, tercatat tujuh orang jadi korban, empat ibu-ibu dan tiga mahasiswa. Sampai Kamis (7/3/19), tujuh orang itu masih mendapatkan perawatan di RSUD Kota Kendari. Ibu-ibu lemas karena terpapar asap gas air mata. Sedang tiga mahasiswa dirawat karena mendapat pukulan benda keras.

Hasinah, perempuan 53 tahun ini petani di Wawonii. Dia bilang, kepala pusing dan mata merah. Meskipun begitu, dia tak gentar. “Konsekuensi perjuangan. Daripada kita mati perlahan-lahan karena pulau ditambang. Mending, kami mati di Kendari, saat demo saja,” katanya.

Dia tak akan berhenti menyuarakan penolakan tambang di Wawonii. Belum juga beroperasi, perusahaan tambang sudah mencaplok lahan mereka. Pohon produksi mereka, seperti jambe mente, pun terancam.

“Mau digusur semua. Kami tidak mau. Kami menolak tambang. Kami mau bertani. Kami sudah bisa hidup,” katanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gubernur lambat cabut izin

Gubernur Sulawesi Tenggara, H. Ali Mazi, dinilai lambat mencabut IUP di Wawonii. Gubernur juga terkesan membiarkan masalah ini berlarut dan rela melihat korban berjatuhan.

Mando, kordinator warga menolak tambang mengatakan, masalah di Wawonii, sudah disampaikan sejak kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra 2018.

Kala Ali Mazi menginjakkan kaki di Wawonii, kata Mando, warga sudah menyampaikan keluhan soal tambang.

Kala itu, Ali berjanji siap menolak pertambangan di Pulau Kelapa itu. Setelah duduk jadi gubernur, Ali seakan lupa ingatan. Hal itu terlihat pada program 100 hari Ali Mazi.

“Tak ada penyelesaian konflik Wawonii. Kami sampaikan lewat demo di DPRD Sultra, hasilnya DPRD mengeluarkan rekomendasi agar gubernur segera mencabut IUP. Sampai sekarang, masuk 2019, IUP tidak juga dicabut,” kata Mando.

Mando mengatakan, masalah tambang di Wawonii, menabrak setidaknya dua aturan, UU Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dan Peraturan Pemerintah Sulawesi Tenggara tahun 2014.

Pulau kecil, seharusnya bebas izin tambang

Pulau Wawonii, katanya, masuk pulau-pulau kecil di Indonesia. Ekosisitemnya harus tetap terjaga dan tak boleh ada pertambangan karena bisa merusak.

Dia bilang, yang masuk IUP penambangan di Wawonii, ada enam kecamatan dengan luas 23.373 hektar atau 32,08% dari total daratan Kepulauan Wawoni, hanya 73.992 hektar.

Berdasarkan UU Nomor 1/2014 tentang Perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, luasan suatu wilayah yang bisa ditambang lebih dari 2.000 kilometer persegi. Luasa wilayah Wawonii, hanya 700-an lebih kilometer persegi, atau 73.000-an hektar.

Enam kecamatan yang masuk dalam wilayah IUP, kata Mando, Wawonii Barat, Wawonii Tengah, Wawonii Selatan, Wawonii Timur, Wawonii Utara, dan Wawonii Tenggara.

Dalam RTRW Sultra No 2/2014, Pasal 39, menjelaskan, Wawonii tidak untuk kawasan pertambangan. Wawonii hanya buat pertanian, perikanan dan pariwisata.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Konawe Kepulauan juga menyebutkan, pulau ini rawan bencana longsor dan banjir. “Tak bisa ada aktivitas pertambangan,” katanya.

Dari rincian itu, kata Mando, gubernur sudah bisa mencabut IUP di Wawonii. Sayangnya, dari keterangan-keterangan itu, Ali Mazi belum bisa mengambil sikap. “Kami hanya mempertahankan budaya kami. Kami petani dan pengusaha jambu mete dan kopra. Bukan penambang. Kami takut daerah rusak. Ini yang kami perjuangkan.”

Walhi Sultra, juga mengancam tindakan represif polisi kala membubarkan massa demonstrasi yang menolak pertambangan di Konawe Kepulauan.

Saharuddin, Direktur Eksekutif Walhi Sultra, mendukung perjuangan warga Wawonii. Mereka, katanya, ingin mempertahankan lingkungan hidup

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sehat dan dilindungi Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32/2009.

Kepolisian dan Pol PP, katanya, seharusnya bisa menahan diri dan tak anarkis kepada warga. Mereka, katanya, hanya sekelompok orang yang menyuarakan keprihatinan terhadap tempat hidup.

Walhi mendesak, pelaku kekerasan baik Polri maupun Satpol PP bisa ditindak sesuai hukum berlaku.

“Kekerasan itu tindak pidana. Harus diusut,” kata Udin, sapaan akrabnya.

Selain itu, kata Udin, Konkep, merupakan pulau kecil yang tak layak ada eksplorasi maupun eksploitasi pertambangan.

“Kami juga mendesak gubernur mencabut IUP. Kami meminta, warga bersama-sama berkolaborasi menggugat pemerintah agar mencabut IUP itu.”

Hidayatullah, Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (Jadi) Sultra, dalam keterangan pers, mengatakan, cara aparat menggunakan kekerasan dalam menangani demonstrasi di luar batas prosedur. Dia menuntut, Pemprov Sultra dan kepolisian bertanggung jawab karena jatuh korban.

Demonstrasi, katanya, bagian dari ekspresi pendapat, yang dijamin dalam negara demokrasi. Penyampaian pendapat itu, katanya, harus dilindungi. “Meminta Gubernur Sultra dan Kapolda Sultra, minta maaf terbuka atas kekerasan itu.”

Berdasarkan berita diatas menunjukkan bahwa terdapat nilai-nilai berita yang terkandung didalamnya yaitu *Significance* (kepentingan), *Timelinness* (waktu), *Magnitude* (besaran), *Proximity* (kedekatan), *Prominence* (keterkenalan).

b. Dimensi Imparsialitas

1. Akses Proporsional

Berita yang berimbang adalah berita yang menampilkan semua sisi tidak menghilangkan dan menyeleksi sisi tertentu untuk diberitakan. Berikut sajian hasil analisis akses proporsional pada berita dengan penjabaran tabel frekuensi dibawah ini:

Tabel 5.7
Tabel Frekuensi Akses Proporsional

No	Akses Proporsional	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	1 sisi	33	91.67%
2	2 sisi	3	8.3%
Total		36	100%

Sumber: Data Penelitian

$$p = \frac{f}{N} \times 100 \%$$

a. Satu Sisi

$$P = \frac{33}{36} \times 91.67 \%$$

b. Dua Sisi

$$p = \frac{3}{36} \times 8.3 \%$$

Keterangan:

P	= Persentase
f	= frekuensi
N	= Jumlah Nilai
100%	= Ketetapan Rumus

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui Akses Proporsional pada berita Tambang Batubara di Media Online Mongabay.co.id adalah (91.67%) dengan jumlah 33 berita. Sementara itu 3 (8.3%) berita tidak memenuhi unsur 1 sisi pada Akses Proporsional. Maka dapat disimpulkan bahwa indikator akses proporsional pada pemberitaan ini adalah sangat objektif.

Contoh kutipan berita yang menunjukkan akses proporsional pada berita dengan judul “Pemerintah Aceh Diminta Lindungi Hutan dari Aktivitas Pertambangan”:

Pemerintah Provinsi Aceh telah mencabut 98 izin usaha pertambangan [IUP] eksplorasi dan operasi produksi mineral logam dan batubara. Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Aceh Nomor 540/1436/2018 tanggal 27 Desember 2018.

Dari 98 IUP, tercatat luas hutan dan bukan kawasan hutan yang dikuasai perusahaan mencapai 549.119 hektar. Meski IUP telah dicabut, namun dalam keputusan itu disebutkan pula, tidak menghilangkan kewajiban keuangan pemegang IUP di Aceh untuk menyelesaikan tunggakan penerimaan negara bukan pajak [PNBP]. Jumlah total PNBP yang belum lunas mencapai Rp41 miliar.

Menanggapi pencabutan IUP tersebut, Gerakan Anti Korupsi [GeRAK] Aceh bersama Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh [HAKA] mendesak Pelaksana Tugas [Plt] Gubernur Aceh, Nova Iriansyah untuk melakukan proteksi hutan dari segala kegiatan pertambangan.

Mereka menilai, Pemerintah Aceh harus segera melakukan perlindungan hutan dan lahan sehingga tidak lagi dimanfaatkan perusahaan tambang.

Fernan, Kepala Divisi Kebijakan Publik GeRAK Aceh, Sabtu [05/10/2019] mengatakan, dalam diseminasi data luasan hutan yang diselamatkan pasca-pengakhiran 98 IUP, diketahui seluruh izin tersebut tersebar di 14 kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

Rinciannya, Kabupaten Aceh Besar [4 IUP, 4.656 hektar], Aceh Jaya [10 IUP, 31.368 hektar], Aceh Barat [7 IUP, 20.329 hektar], Nagan Raya [1 IUP, 90.576 hektar], Aceh Barat Daya [2 IUP, 298,9 hektar], Aceh Selatan [14 IUP, 59.826 hektar], dan Aceh Singkil [6 IUP, 46.313 hektar].

Berikutnya, Gayo Lues [2 IUP, 41.200 hektar], Aceh Tamiang [4 IUP, 33.559 hektar], Aceh Tengah [13 IUP, 190.568 hektar], Aceh Timur [2 IUP, 6.080 hektar], Pidie Jaya [2 IUP, 2.555 hektar], Pidie [14 IUP, 114.205 hektar], dan Kota Subussalam [8 IUP, 6.227 hektar].

Fernan menjelaskan, berdasarkan hasil analisis data luasan eks wilayah IUP tersebut, diperoleh gambaran bahwa 305.589 hektar berada di kawasan hutan. Sisanya, 242.499 hektar di areal penggunaan lain [APL].

“Hasil interpretasi citra satelit menunjukkan, dari total luasan IUP itu, sekitar 286.293 hektar masih memiliki tutupan hutan, selebihnya tidak berhutan. Dari eks IUP itu, yang berada di Kawasan Ekosistem Leuser [KEL] seluas 181.673 hektar,” ujarnya.

Tidak diperpanjang moratorium tambang

Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani menilai, tidak diperpanjangnya moratorium tambang di Aceh merupakan keputusan yang tidak tepat, karena masih banyak persoalan sumber daya alam yang belum ditertibkan.

“Banyak alasan yang bisa dipakai untuk kembali memberlakukan moratorium tambang. Misal, belum ada penyusunan wilayah izin usaha pertambangan [WIUP] dan sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh. Potensi kerugian negara akibat tunggakan piutang penerimaan negara bukan pajak [PNBP] juga belum selesai jumlahnya mencapai Rp41 miliar,” jelasnya.

Masalah lain, sambung Askhalani, lemahnya pengawasan reklamasi dan pasca-tambang. Banyaknya IUP di kawasan hutan lindung harus menjadi tolok ukur memperpanjang jeda tambang ini. IUP yang sudah clean and clear [CnC] juga, masih menimbulkan masalah serta konflik dengan masyarakat.

“Kami mendesak Plt. Gubernur untuk memperpanjang moratorium tambang. Banyak manfaat yang dirasakan masyarakat dan pemerintah sejak penertiban tambang dilakukan. Bahkan, hutan jauh dari ancaman perusahaan,” tegasnya.

Sekretaris Yayasan HAka, Badrul menyampaikan, terdapat beberapa poin yang harus dilaksanakan Pemerintah Aceh, terkait urusan tambang. Validasi data dengan melakukan ground checking untuk mendapatkan gambaran nyata terhadap eks WIUP harus ada.

“Pemerintah Aceh juga harus mempertimbangkan kembali peruntukan bekas WIUP di kawasan hutan maupun APL yang bernilai sosial dan ekologi tinggi,” ujarnya.

Badrul mengatakan, Pemerintah Aceh perlu mempertimbangkan kembali pemanfaatan hutan dan lahan tersebut sebagai potensi kema perhutanan sosial yang diintegrasikan dalam pola ruang Peninjauan Kembali [PK] Rancangan Tata Ruang Wilayah Aceh [RTRWA]. Diusulkan, menjadi Peta Indikatif Alokasi Perhutanan Sosial [PIAPS] di Aceh.

“Selain itu, Pemerintah Aceh perlu melanjutkan moratorium izin tambang, guna menjamin peruntukan hutan dan lahan. Tentunya, dengan

mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan serta tujuan pembangunan Aceh sebagaimana UU Pemerintah Aceh," tandasnya.

Berdasarkan penjabaran diatas, terdapat pemberian porsi yang sama terhadap pihak-pihak yang terlibat, sehingga berita tersebut merupakan liputan semua sisi atau dua sisi antara Fernan, Kepala Divisi Kebijakan Publik GeRAK Aceh, Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani, dan Sekretaris Yayasan HAKA, Badrul.

2. Non-Evaluatif

Non-evaluatif yaitu tidak adanya pencampuran fakta dan opini seorang wartawan pada sebuah berita. Berikut sajian hasil analisis non-evaluatif pada berita dengan penjabaran tabel frekuensi dibawah ini:

Tabel 5.8
Tabel Frekuensi Non-Evaluatif

No	Non-Evaluatif	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Ya	34	94.44%
2	Tidak	2	5.56%
Total		36	100%

Sumber: Data Penelitian

$$p = \frac{f}{N} \times 100 \%$$

a. Ya (Non-Evaluatif)

$$p = \frac{34}{36} \times 94.44 \%$$

b. Tidak (Evaluatif)

$$p = \frac{2}{36} \times 5.56 \%$$

Keterangan:

P = Persentase

f = frekuensi

N = Jumlah Nilai

100% = Ketetapan Rumus

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui non-evaluatif pada berita Tambang Batubara di Media Online Mongabay.co.id adalah 94.44% dengan jumlah 34 berita, yang artinya tidak ada pencampuran fakta dan opini wartawan dalam berita. Sementara itu 2 berita evaluative (ada pencampuran fakta dan opini wartawan) dengan persentase 5.56%. maka dapat disimpulkan bahwa indikator non-evaluatif pada pemberitaan ini adalah sangat objektif.

Contoh kutipan berita non-evaluatif adalah pada berita dengan judul “Koalisi Tolak Jalan Angkut Batubara Lewati Hutan Harapan (Bagian 2)”:

Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Selatan dan Jambi, beranggotakan 36 lembaga menolak dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) jalan angkut batubara membelah Hutan Harapan, usulan dari PT Marga Bara Jaya (MBJ). Penolakan ini disampaikan pada kegiatan rapat Komisi Penilai Amdal Pusat, soal lanjutan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup rencana pembangunan jalan khusus angkut batubara, hasil kebun dan hasil hutan di Kabupaten Musi Rawas Utara, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Kabupaten Batanghari, Jambi oleh MBJ, di Palembang, akhir Maret lalu.

Yulqori, KKI Warsi mengatakan, ada empat hasil keputusan koalisi terhadap pembahasan amdal lanjutan yang sebelumnya dibahas di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Februari lalu. Mereka sepakat penolakan jalan tambang yang membelah di Hutan Harapan yang dikelola dan sudah pemerintah berikan izin restorasi ekosistem kepada PT Restorasi Ekosistem (Reki).

“Kami koalisi menolak rencana pembangunan jalan khusus angkut batubara usulan MBJ melalui kawasan hutan PT Reki, termasuk menolak dokumen amdal,” katanya. Koalisi antara lain, KKI Warsi, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Jambi dan Sumsel, Hutan Kita Institut, Zoological Society of London, Forum Harimau Kita, Forum Konservasi Gajah Indonesia, dan LBH Palembang dan lain-lain.

Koalisi juga merekomendasikan, MBJ membangun jalan PT Conoco Philip dan PT Bumi Persada Permai. Koalisi juga merekomendasikan agar KLHK memfasilitasi kerjasama operasional penggunaan jalan eksisting di areal PT Sentosa Bahagia Bersama (SBB)– yang selama ini tak pernah dilibatkan sebagai pemangku kepentingan utama dari rencana pembangunan jalan khusus angkutan batubara oleh MBJ itu.

Dalam berita acara pertemuan dengan Komisi Penilai Amdal, pada poin dua, memutuskan, agar MBJ mengubah jalur jalan ke luar Hutan Harapan atau memanfaatkan jalur eksisting. ”Ada poin 2a, dari hasil berita acara menyebutkan itu karena banyak penolakan terhadap rencana itu, maka didapatkan hasil rapat itu,” katanya.

Hasil berita acara itu ditandatangani langsung A. Haryono, Direktur MBJ dan Ari Sudijanto, selaku Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan KLHK– Sekretaris Komisi Penilai Amdal Pusat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Koalisi masyarakat sipil juga membuat petisi di [Change.org](https://www.change.org), berjudul “Tolak jalan tambang di hutan dataran rendah, yang tersisa di Sumatera Selatan dan Jambi.”

Sarmita, Deputy Manajer Perlindungan Hutan PT Reki mengatakan, rencana pembangunan jalan angkut tambang batubara, akan menambah ancaman pada Hutan Harapan.

Kalau jalan itu terealisasi, katanya, bagian selatan Hutan Harapan, akan jadi pintu masuk bagi perambah maupun pembalak. “Ini kan jarak dekat sekali dengan jalan yang akan dibangun.”

Adam Aziz, Direktur Operasional PT Reki, tegas menolak rencana jalan angkut tambang batubara di Hutan Harapan. “Kami meminta Komisi Penilai Amdal tak mengeluarkan rekomendasi kelayakan lingkungan terhadap usulan pembangunan jalan khusus angkutan batubara dalam Hutan Harapan dan mendukung KLHK tak menerbitkan izin pinjam pakai kawasan hutan kepada PT Marga Bara Jaya,” katanya.

Alasan penolakan PT Reki, katanya, berdasarkan analisis, jalan angkut batubara mengancam pemulihan hutan PT Reki, yang sudah berjalan selama 10 tahun terakhir. Ancaman itu, katanya, antara lain, terjadi fragmentasi hutan dan deforestasi, dapat mengganggu habitat hidupan satwa liar, serta keragaman hayati hutan dataran rendah Sumatera. Selain itu, pembukaan jalan yang membelah Hutan Harapan, dia yakini memberi akses baru bagi perambah hutan hingga mempertinggi tekanan terhadap kawasan.

PT Reki, tak menolak jalan angkut batubara asalkan tak melalui Hutan Harapan. Perusahaan, katanya, bisa memanfaatkan jalan yang dipakai saat ini (warga menyebut Jalan Conoco Philips), atau alternatif lain, yakni memanfaatkan jalan eksisting PT Bumi Persada Permai dan PT Sentosa Bahagia Bersama.

“Sejak awal, PT Reki di perbatasan Jambi-Sumatera, untuk memulihkan ekosistem hutan tropis dataran rendah Sumatera. Izin diberikan pemerintah merupakan representasi dari 20% hutan dataran rendah tersisa, yang masih memiliki keragaman hayati luar biasa,” kata Adam.

Mongabay berusaha menghubungi Direktur Operasional PT Marga Bara Jaya, Rojak, namun tak mendapatkan balasan baik dari pesan Whatsapp maupun sambungan telepon.

Perambahan dan pembalakan liar

Selama ini, Hutan Harapan, sudah cukup tertekan dengan perambahan dan pembalakan liar. Kondisi jadi makin sulit kalau ada jalan tambang batubara membelah Hutan Harapan.

Hari itu, perahu mesin 16pk membawa kami menuju Sungai Batanghari Leko dari tepi Sungai Meranti. Sepanjang perjalanan sekitar tiga jam kami disuguhi kayu-kayu balok utuh terikat mengapung di pinggir sungai. Diduga kayu-kayu itu berasal dari Hutan Harapan. Kayu-kayu balok terjejer rapi. Pada ujung pertemuan Jembatan Sungai Bintialo, saya melihat empat orang sedang berbincang serius di atas tumpukan kayu.

Salah seorang, melihat sinis perahu yang kami tumpangi. Saya perkirakan kayu-kayu yang kami temui mencapai ratusan meter kubik.

Pikal, Masyarakat Batin Sembilan, bilang, pembalakan liar sudah sejak dulu ada. Bahkan para pemodal (toke) dari Desa Bintialo, Kecamatan Batanghari Leko, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, sempat menggunakan jasa mereka untuk membalak di kawasan hutan.

Tahun 2015, dia mengaku sempat mendapatkan dana dari toke untuk menebang hutan. Mereka mendapatkan dana awal dengan utang ke toke. Pikal bilang, hasil yang mereka dapatkan tak sebanding dengan tenaga dan biaya operasional. "Tiap bereken tekor, tiap bereken tekor, kayu-kayu kami jual murah ke toke. Kayu acuk, pulai, Cuma Rp200.000 per kubik. Kami dulu cuma pakai kapak, sehari cuma dapat 3-4 kubik ada lima anggota. Dak balik modal, rugi," katanya.

Pikal pun merasakan hanya diperalat toke, hingga memutuskan berjuang kembali mengamankan kawasan hutan tempat tinggal mereka. "Toke tulah yang nambah kayo, kami ni dak dapat apo-apo. Hewan buruan, damar, rotan, jernang kami, sulit ditemui karena mereka."

Kini, Pikal bersama 25 masyarakat Batin Sembilan, berada di garis terdepan menjaga Hutan Harapan. Pikal menjadi pasukan patroli yang mengamankan hutan.

Sarmita kewalahan dengan dua masalah yang mereka hadapi antara lain persoalan perambahan dan pembalakan. "Ada dua kendala besar saat ini kami hadapi, yaitu, perambahan dan pembalakan. Kalau masalah perambahan, kita terkendala dengan ada lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang membekingi. Untuk illegal logging ini lebih anarkis. Bahkan, tim pengamanan kami sempat diancam dan dua perahu kami sempat dirusak karena penyisiran,"katanya. (**Habis**)

Dalam berita diatas menunjukkan tidak adanya pencampuran opini wartawan dalam suatu berita sehingga berita tersebut dikatakan non-evaluatif.

3. Non-Sensasional

Berita dikatakan non-sensasional apabila fakta ditulis secara apa adanya tanpa dilebih-lebihkan atau dramatisasi, serta terdapat kesesuaian antara judul da nisi berita. Berikut sajian hasil analisis non-sensasional pada berita dengan penjabaran tabel frekuensi dibawah ini:

Tabel 5.9
Tabel Frekuensi Non-Sensasional

No	Non-Sensasional	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Ya	35	97%
2	Tidak	1	3%
Total		36	100%

Sumber: Data Penelitian

$$p = \frac{f}{N} \times 100 \%$$

a. Ya (Non-Sensasional)

$$p = \frac{35}{36} \times 97 \%$$

- b. Tidak (Sensasional)

$$p = \frac{1}{36} \times 3 \%$$

Keterangan:

P	= Persentase
f	= frekuensi
N	= Jumlah Nilai
100%	= Ketetapan Rumus

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui non-sensasional pada berita Tambang Batubara di Media Online Mongabay.co.id adalah 97% dengan jumlah 35 berita. Sementara itu 1 berita sensasional dengan persentase 3%. Maka dapat disimpulkan bahwa indikator non-sensasional pada pemberitan ini adalah sangat objektif.

Contoh kutipan berita non-sensasional adalah pada berita dengan judul” Pemerintahan Aceh Tidak Lagi Perpanjang Moratorium Tambang, Mengapa?”:

Pemerintah Provinsi Aceh tidak lagi memperpanjang moratorium tambang yang telah berjalan sejak 2014. Tidak dilanjutkannya kebijakan ini diketahui dari surat Nomor: 540/1112 yang ditandatangani Sekretaris Daerah Aceh Taqwallah, atas nama Gubernur Aceh, tanggal 24 Januari 2019.

Surat tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

“Dengan tidak ditetapkan instruksi gubernur yang baru, agar diperhatikan kembali tata kelola pertambangan yang baik khususnya mineral logam dan batubara untuk menjamin keberlangsungan investasi sektor pertambangan serta perkebunan kelapa sawit. Tentunya, dengan melakukan kajian komprehensif mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah Aceh,” sebagaimana isi surat tersebut.

Kepala Bagian Humas dan Media Massa Pemerintah Aceh, Saifullah A Gani, kepada Mongabay Indonesia memastikan surat tersebut benar. “Namun itu bukan surat keputusan, tapi lebih mengisi kekosongan setelah moratorium tambang dan kelapa aawit berakhir,” jelasnya Senin [25/02/2019].

Menurut Saifullah, surat itu juga jelas menyebutkan, agar diperhatikan kembali tata kelola pertambangan yang baik di Aceh serta perkebunan kelapa sawit melalui kajian mendalam. “Bila sesuai kajian lingkungan tidak mendukung, dengan sendirinya tidak bisa dikeluarkan izin,” terangnya.

Sebelumnya, Pemerintah Aceh telah mengeluarkan instruksi perpanjangan moratorium tambang Nomor: 05/INSTR/2017, 15 Desember 2017. Isinya, perpanjangan moratorium dalam rangka penyempurnaan tata

kelola pertambangan yang strategis, terpadu, dan terkoordinir, yang berakhir 15 Juni 2018.

Terakhir, melalui Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 540/1436/2018 yang ditandatangani 27 Desember 2018, Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah mencabut 98 izin usaha pertambangan eksplorasi dan izin usaha pertambangan operasi produksi mineral dan batubara.

Dalam surat itu dinyatakan, pengakhiran izin usaha pertambangan tidak menghilangkan kewajiban keuangan pemegang izin usaha pertambangan [IUP] di Aceh dalam menyelesaikan tunggakan penerimaan negara bukan pajak [PNBP] hingga batas berakhirnya izin kepada negara dan daerah.

Izin usaha pertambangan yang dicabut tersebut yaitu di Kabupaten Aceh Besar [4 IUP 4.656 hektar], Aceh Jaya [10 IUP 31.368 hektar], Aceh Barat [7 IUP 20.329 hektar], Nagan Raya [1 IUP 90.576 hektar], Aceh Barat Daya [2 IUP 298,9 hektar], Aceh Selatan [14 IUP 59.826 hektar], Aceh Sungkil [6 IUP 46.313 hektar], Gayo Lues [2 IUP 41.200 hektar], Aceh Tamiang [4 IUP 33.559 hektar], Aceh Tengah [13 IUP 190.568 hektar], Aceh Timur [2 IUP 6.080 hektar], Pidie Jaya [2 IUP 2.555 hektar], Pidie [14 IUP 114.205 hektar], dan Kota Subussalam [8 IUP 6.227 hektar].

Tidak tepat

Data Gerakan Anti Korupsi Aceh [GeRAK] menunjukkan pada 2014, tercatat IUP di Aceh mencapai 138 unit dengan luas lahan 841 ribu hektar. Dalam perkembangannya, hingga 2018, sebanyak 98 IUP dicabut, dimulai dari pemberlakuan moratorium tambang pertama melalui Instruksi Gubernur Aceh Nomor 11/INSTR/2014.

Dengan tidak diperpanjangnya moratorium tambang, Koordinator GeRAK Askhalani menilai, kebijakan ini sangat tidak tepat karena masih banyak persoalan sumber daya alam yang belum ditertibkan.

“Banyak alasan yang bisa dipakai untuk kembali memberlakukan moratorium tambang. Misal, belum ada penyusunan wilayah izin usaha pertambangan [WIUP] dan sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh. Potensi kerugian negara akibat tunggakan piutang penerimaan negara bukan pajak [PNBP] juga belum tertagih yang jumlahnya mencapai Rp40 miliar,” jelasnya.

Masalah lain, sambung Askhalani, lemahnya pengawasan reklamasi dan pascatambang. Banyaknya IUP di kawasan hutan lindung harus menjadi tolok ukur memperpanjang jeda tambang ini. “IUP yang sudah clean and clear (CnC) juga, masih menimbulkan permasalahan serta konflik dengan masyarakat yang belum tuntas.”

Askhalani menilai, surat yang ditandatangani Sekretaris Daerah Aceh itu sangat tidak masuk akal dan terkesan dipaksakan. Ini kebijakan besar, seharusnya ditandatangani oleh Gubernur Aceh atau sekretaris daerah defenitif.

“Kami mendesak Plt. Gubernur Aceh mencabut surat itu dan memperpanjang moratorium tambang. Banyak manfaat yang dirasakan masyarakat dan pemerintah sejak penertiban tambang dilakukan. Bahkan, hutan jauh dari ancaman perusahaan tambang,” tegasnya.

Berdasarkan berita diatas, terdapat kesesuaian antara judul dengan isi berita dan fakta berita tersebut ditulis apa adanya tanpa dilebih-lebihkan atau dramatisasi sehingga berita tersebut non-sensasional.

Berita dengan judul “Sudah 34 Korban, Lubang Tambang Batubara di Kaltim Terus Merenggut Nyawa”.

Tabel 5.10
Tabel Data Berita Pertama
“Sudah 34 Korban, Lubang Tambang Batubara di Kaltim Terus Merenggut Nyawa”

Dimensi	Indikator	Penilaian
Faktualitas	Faktualitas	1
	Akurasi	1
	Kelengkapan Isi	1
	Relevan	1
Imparsialitas	Akses Proporsional	1
	Non-Evaluatif	1
	Non-Sensasional	1

Pada berita pertama ini, peneliti menemukan bahwa dari 7 indikator yang diteliti berhasil memnuhi seluruh indikator objektivitas yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan penjabaran dari pemberitaan “Sudah 34 Korban, Lubang Tambang Batubara di Kaltim Terus Merenggut Nyawa” dapat dikatakan bahwa tingkat objektivitas berita tersebut adalah sangat Objektif. Berikut sajian data dengan menggunakan tabel frekuensi dibawah ini:

Tabel 5.11
Tabel Frekuensi Berita Pertama
Sudah 34 Korban, Lubang Tambang Batubara di Kaltim Terus Merenggut Nyawa”

Hasil Penelitian	N	Persentase (%)
Indikator Terpenuhi	7	100%
Indikator tidak terpenuhi	0	0%
Jumlah	7	100%

Berita dengan judul “Aturan Baku Mutu Emisi, ‘Karpét Merah’ PLTU Batubara Cemari Udara”

Tabel 5.12
Tabel Data Berita Kedua
“Aturan Baku Mutu Emisi, ‘Karpét Merah’ PLTU Batubara Cemari Udara”

Dimensi	Indikator	Penilaian
Faktualitas	Faktualitas	1
	Akurasi	1
	Kelengkapan Isi	0
	Relevan	1
Imparsialitas	Akses Proporsional	1
	Non-Evaluatif	1
	Non-Sensasional	1

Pada berita kedua ini, peneliti menemukan bahwa dari 7 indikator yang diteliti, 1 diantaranya tidak berhasil dipenuhi, yaitu indikator kelengkapan isi.

Berdasarkan penjabaran dari pemberitaan “Aturan Baku Mutu Emisi, ‘Karpét Merah’ PLTU Batubara Cemari Udara” dapat dikatakan bahwa tingkat objektivitas berita tersebut adalah sangat Objektif. Berikut sajian data dengan menggunakan tabel frekuensi dibawah ini:

Tabel 5.13
Tabel Frekuensi Berita Kedua
“Aturan Baku Mutu Emisi, ‘Karpét Merah’ PLTU Batubara Cemari Udara”

Hasil Penelitian	N	Persentase (%)
Indikator Terpenuhi	6	86%
Indikator tidak terpenuhi	1	14%
Jumlah	7	100%



Hak Cipta © Ha ta m ungi Ur -Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Berita dengan judul “Nelayan dan Petani di Langkat Serukan Setop Energi Batubara, Alihkan ke Terbarukan”

Tabel 5.14
Tabel Data Berita Ketiga
“Nelayan dan Petani di Langkat Serukan Setop Energi Batubara, Alihkan ke Terbarukan”

Dimensi	Indikator	Penilaian
Faktualitas	Faktualitas	1
	Akurasi	1
	Kelengkapan Isi	1
	Relevan	1
Imparsialitas	Akses Proporsional	1
	Non-Evaluatif	1
	Non-Sensasional	1

Pada berita ketiga ini, peneliti menemukan bahwa dari 7 indikator yang diteliti berhasil memnuhi seluruh indikator objektivitas yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan penjabaran dari pemberitaan “Nelayan dan Petani di Langkat Serukan Setop Energi Batubara, Alihkan ke Terbarukan” dapat dikatakan bahwa tingkat objektivitas berita tersebut adalah sangat Objektif. Berikut sajian data dengan menggunakan tabel frekuensi dibawah ini:

Tabel 5.15
Tabel Frekuensi Berita Ketiga
Aturan Baku Mutu Emisi, ‘Karpas Merah’ PLTU Batubara Cemari Udara”

Hasil Penelitian	N	Persentase (%)
Indikator Terpenuhi	7	100%
Indikator tidak terpenuhi	0	0%

Jumlah	7	100%
--------	---	------

4. Berita dengan judul “Nasib Pulau-pulau Kecil dalam Cengkeraman Tambang”

Tabel 5.16
Tabel Data Berita Keempat
“Nasib Pulau-pulau Kecil dalam Cengkeraman Tambang”

Dimensi	Indikator	Penilaian
Faktualitas	Faktualitas	1
	Akurasi	1
	Kelengkapan Isi	1
	Relevan	1
Imparsialitas	Akses Proporsional	0
	Non-Evaluatif	1
	Non-Sensasional	1

Pada berita keempat ini, peneliti menemukan bahwa dari 7 indikator yang diteliti, 1 diantaranya tidak berhasil dipenuhi yaitu indikator Akses Proporsional.

Berdasarkan penjabaran dari pemberitaan “Nasib Pulau-pulau Kecil dalam Cengkeraman Tambang” dapat dikatakan bahwa tingkat objektivitas berita tersebut adalah sangat Objektif. Berikut sajian data dengan menggunakan tabel frekuensi dibawah ini:

Tabel 5.17
Tabel Frekuensi Berita Keempat
“Nasib Pulau-pulau Kecil dalam Cengkeraman Tambang”

Hasil Penelitian	N	Persentase (%)
Indikator Terpenuhi	6	86%
Indikator tidak terpenuhi	1	14%
Jumlah	7	100%

- Hak Cipta © Ha a mill UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Sate Isamic U UIN Suska Riau
- University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berita dengan judul “Aturan Baku Mutu Air Limbah PLTU Batubara Bisa Bahayakan Laut”

Tabel 5.18
Tabel Data Berita Kelima
“Aturan Baku Mutu Air Limbah PLTU Batubara Bisa Bahayakan Laut”

Dimensi	Indikator	Penilaian
Faktualitas	Faktualitas	1
	Akurasi	1
	Kelengkapan Isi	1
	Relevan	1
Imparsialitas	Akses Proporsional	1
	Non-Evaluatif	1
	Non-Sensasional	1

Pada berita kelima ini, peneliti menemukan bahwa dari 7 indikator yang diteliti berhasil memnuhi seluruh indikator objektivitas yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan penjabaran dari pemberitaan “Aturan Baku Mutu Air Limbah PLTU Batubara Bisa Bahayakan Laut” dapat dikatakan bahwa tingkat objektivitas berita tersebut adalah sangat Objektif. Berikut sajian data dengan menggunakan tabel frekuensi dibawah ini:

Tabel 5.19
Tabel Frekuensi Berita Kelima
“Aturan Baku Mutu Air Limbah PLTU Batubara Bisa Bahayakan Laut”

Hasil Penelitian	N	Persentase (%)
Indikator Terpenuhi	7	100%
Indikator tidak terpenuhi	0	0%
Jumlah	7	100%

6. Berita dengan judul “Aturan Baku Mutu Emisi, “Laporan Global Witness soal Transaksi Perusahaan Batubara Mencurigakan, LSM: Pemerintah Harus Telusuri”

Tabel 5.20

Tabel Data Berita Keenam**“Laporan Global Witness soal Transaksi Perusahaan Batubara Mencurigakan, LSM: Pemerintah Harus Telusuri”**

Dimensi	Indikator	Penilaian
Faktualitas	Faktualitas	1
	Akurasi	1
	Kelengkapan Isi	1
	Relevan	1
Imparsialitas	Akses Proporsional	1
	Non-Evaluatif	1
	Non-Sensasional	1

Pada berita keenam ini, peneliti menemukan bahwa dari 7 indikator yang diteliti, 3 diantaranya tidak berhasil dipenuhi, yaitu indikator Kelengkapan Isi, Akses Proporsional, dan Non-Evaluatif.

Berdasarkan penjabaran dari pemberitaan “Aturan Baku Mutu Emisi, ‘Aturan Baku Mutu Emisi, “Laporan Global Witness soal Transaksi Perusahaan Batubara Mencurigakan, LSM: Pemerintah Harus Telusuri” dapat dikatakan bahwa tingkat objektivitas berita tersebut adalah cukup Objektif. Berikut sajian data dengan menggunakan tabel frekuensi dibawah ini:

Tabel 5.21**Tabel Frekuensi Berita Keenam****“Laporan Global Witness soal Transaksi Perusahaan Batubara Mencurigakan, LSM: Pemerintah Harus Telusuri”**

Hasil Penelitian	N	Persentase (%)
Indikator Terpenuhi	4	57%
Indikator tidak terpenuhi	3	43%
Jumlah	7	100%

Berita dengan judul “Aturan Baku Mutu Emisi, “Warga Sekitar PLTU Batubara Ngadu ke Posko Kampanye Jokowi dan Prabowo”.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 5.22
Tabel Data Berita Ketujuh
“Aturan Baku Mutu Emisi, “Warga Sekitar PLTU Batubara Ngadu ke Posko
Kampanye Jokowi dan Prabowo”

Dimensi	Indikator	Penilaian
Faktualitas	Faktualitas	1
	Akurasi	1
	Kelengkapan Isi	1
	Relevan	1
Imparsialitas	Akses Proporsional	1
	Non-Evaluatif	1
	Non-Sensasional	1

Pada berita ketujuh ini, peneliti menemukan bahwa dari 7 indikator yang diteliti berhasil memenuhi seluruh indikator objektivitas yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan penjabaran dari pemberitaan “Aturan Baku Mutu Emisi, “Warga Sekitar PLTU Batubara Ngadu ke Posko Kampanye Jokowi dan Prabowo” dapat dikatakan bahwa tingkat objektivitas berita tersebut adalah sangat Objektif. Berikut sajian data dengan menggunakan tabel frekuensi dibawah ini:

Tabel 5.23
Tabel Frekuensi Berita Ketujuh
“Aturan Baku Mutu Emisi, “Warga Sekitar PLTU Batubara Ngadu ke Posko
Kampanye Jokowi dan Prabowo”

Hasil Penelitian	N	Persentase (%)
Indikator Terpenuhi	7	100%
Indikator tidak terpenuhi	0	0%

Jumlah	7	100%
--------	---	------

Berita dengan judul “Suarakan Daya Rusak Tambang, Koalisi Protes di Kementerian Energi”

Tabel 5.24
Tabel Data Berita Delapan
“Suarakan Daya Rusak Tambang, Koalisi Protes di Kementerian Energi”

Dimensi	Indikator	Penilaian
Faktualitas	Faktualitas	1
	Akurasi	1
	Kelengkapan Isi	1
	Relevan	1
Imparsialitas	Akses Proporsional	1
	Non-Evaluatif	1
	Non-Sensasional	1

Pada berita delapan ini, peneliti menemukan bahwa dari 7 indikator yang diteliti berhasil memenuhi seluruh indikator objektivitas yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan penjabaran dari pemberitaan “Suarakan Daya Rusak Tambang, Koalisi Protes di Kementerian Energi” dapat dikatakan bahwa tingkat objektivitas berita tersebut adalah sangat Objektif. Berikut sajian data dengan menggunakan tabel frekuensi dibawah ini:

Tabel 5.25
Tabel Frekuensi Berita Delapan
“Suarakan Daya Rusak Tambang, Koalisi Protes di Kementerian Energi”

Hasil Penelitian	N	Persentase (%)
Indikator Terpenuhi	7	100%
Indikator tidak terpenuhi	0	0%
Jumlah	7	100%

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berita dengan judul “Dugaan Suap Izin Tambang, KPK: Bupati Kotawaringin Timur Tersangka”

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 5.26
Tabel Data Berita Kesembilan
“Dugaan Suap Izin Tambang, KPK: Bupati Kotawaringin Timur Tersangka”

Dimensi	Indikator	Penilaian
Faktualitas	Faktualitas	1
	Akurasi	1
	Kelengkapan Isi	1
	Relevan	1
Imparsialitas	Akses Proporsional	1
	Non-Evaluatif	1
	Non-Sensasional	1

Pada berita kesembilan ini, peneliti menemukan bahwa dari 7 indikator yang diteliti berhasil memenuhi seluruh indikator objektivitas yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan penjabaran dari pemberitaan “Dugaan Suap Izin Tambang, KPK: Bupati Kotawaringin Timur Tersangka” dapat dikatakan bahwa tingkat objektivitas berita tersebut adalah sangat Objektif. Berikut sajian data dengan menggunakan tabel frekuensi dibawah ini:

Tabel 5.27
Tabel Frekuensi Berita Kesembilan
“Dugaan Suap Izin Tambang, KPK: Bupati Kotawaringin Timur Tersangka”

Hasil Penelitian	N	Persentase (%)
Indikator Terpenuhi	7	100%
Indikator tidak terpenuhi	0	0%
Jumlah	7	100%

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

10. Berita dengan judul “Pantai Wisata Ini Belum Sepenuhnya Bersih Dari Tumpahan Batubara”

Tabel 5.28
Tabel Data Berita Kesepuluh
“Pantai Wisata Ini Belum Sepenuhnya Bersih Dari Tumpahan Batubara”

Dimensi	Indikator	Penilaian
Faktualitas	Faktualitas	1
	Akurasi	1
	Kelengkapan Isi	1
	Relevan	1
Imparsialitas	Akses Proporsional	1
	Non-Evaluatif	1
	Non-Sensasional	1

Pada berita kesepuluh ini, peneliti menemukan bahwa dari 7 indikator yang diteliti berhasil memenuhi seluruh indikator objektivitas yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan penjabaran dari pemberitaan “Pantai Wisata Ini Belum Sepenuhnya Bersih Dari Tumpahan Batubara” dapat dikatakan bahwa tingkat objektivitas berita tersebut adalah sangat Objektif. Berikut sajian data dengan menggunakan tabel frekuensi dibawah ini:

Tabel 5.29
Tabel Frekuensi Berita Kesepuluh
“Pantai Wisata Ini Belum Sepenuhnya Bersih Dari Tumpahan Batubara”

Hasil Penelitian	N	Persentase (%)
Indikator Terpenuhi	7	100%
Indikator tidak terpenuhi	0	0%
Jumlah	7	100%

11. Berita dengan judul “Korban Jiwa di Lubang Tambang, Masalah Besar Ibu Kota Baru Indonesia”.

Tabel 5.30

Tabel Data Berita Kesebelas**“Korban Jiwa di Lubang Tambang, Masalah Besar Ibu Kota Baru Indonesia”**

Dimensi	Indikator	Penilaian
Faktualitas	Faktualitas	1
	Akurasi	1
	Kelengkapan Isi	1
	Relevan	1
Imparsialitas	Akses Proporsional	1
	Non-Evaluatif	1
	Non-Sensasional	1

Pada berita kesebelas ini, peneliti menemukan bahwa dari 7 indikator yang diteliti berhasil memenuhi seluruh indikator objektivitas yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan penjabaran dari pemberitaan “Korban Jiwa di Lubang Tambang, Masalah Besar Ibu Kota Baru Indonesia” dapat dikatakan bahwa tingkat objektivitas berita tersebut adalah sangat Objektif. Berikut sajian data dengan menggunakan tabel frekuensi dibawah ini:

Tabel 5.31**Tabel Frekuensi Berita Kesebelas****“Korban Jiwa di Lubang Tambang, Masalah Besar Ibu Kota Baru Indonesia”**

Hasil Penelitian	N	Persentase (%)
Indikator Terpenuhi	7	100%
Indikator tidak terpenuhi	0	0%
Jumlah	7	100%

12. Berita dengan judul “Teror Tambang Batubara Hantui Warga Mandiangin”

Tabel 5.32**Tabel Data Berita Keduabelas****“Teror Tambang Batubara Hantui Warga Mandiangin”**

Dimensi	Indikator	Penilaian
---------	-----------	-----------

Faktualitas	Faktualitas	1
	Akurasi	1
	Kelengkapan Isi	1
	Relevan	1
Imparsialitas	Akses Proporsional	1
	Non-Evaluatif	1
	Non-Sensasional	1

Pada berita keduabelas ini, peneliti menemukan bahwa dari 7 indikator yang diteliti berhasil memenuhi seluruh indikator objektivitas yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan penjabaran dari pemberitaan “Teror Tambang Batubara Hantui Warga Mandiangin” dapat dikatakan bahwa tingkat objektivitas berita tersebut adalah sangat Objektif. Berikut sajian data dengan menggunakan tabel frekuensi dibawah ini:

Tabel 5.33
Tabel Frekuensi Berita Keduabelas
“Teror Tambang Batubara Hantui Warga Mandiangin”

Hasil Penelitian	N	Persentase (%)
Indikator Terpenuhi	7	100%
Indikator tidak terpenuhi	0	0%
Jumlah	7	100%

13. Berita dengan judul “Kala Warga Wawonii Tolak Tambang Terjerat Hukum, KKP Temukan Pelanggaran Perusahaan”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic Un

ty of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 5.34
Tabel Data Berita Ketigabelas

“Kala Warga Wawonii Tolak Tambang Terjerat Hukum, KKP Temukan Pelanggaran Perusahaan”

Dimensi	Indikator	Penilaian
Faktualitas	Faktualitas	1
	Akurasi	1
	Kelengkapan Isi	1
	Relevan	1
Imparsialitas	Akses Proporsional	1
	Non-Evaluatif	1
	Non-Sensasional	1

Pada berita ketigabelas ini, peneliti menemukan bahwa dari 7 indikator yang diteliti berhasil memenuhi seluruh indikator objektivitas yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan penjabaran dari pemberitaan “Kala Warga Wawonii Tolak Tambang Terjerat Hukum, KKP Temukan Pelanggaran Perusahaan” dapat dikatakan bahwa tingkat objektivitas berita tersebut adalah sangat Objektif. Berikut sajian data dengan menggunakan tabel frekuensi dibawah ini:

Tabel 5.35
Tabel Frekuensi Berita Ketigabelas

“Kala Warga Wawonii Tolak Tambang Terjerat Hukum, KKP Temukan Pelanggaran Perusahaan”

Hasil Penelitian	N	Persentase (%)
Indikator Terpenuhi	7	100%
Indikator tidak terpenuhi	0	0%

Jumlah	7	100%
--------	---	------

14. Berita dengan judul “Habis Banjir Terbitlah Petisi Tutup Tambang di Bengkulu”

Tabel 5.36
Tabel Data Berita Keenambelas
“Habis Banjir Terbitlah Petisi Tutup Tambang di Bengkulu”

Dimensi	Indikator	Penilaian
Faktualitas	Faktualitas	1
	Akurasi	1
	Kelengkapan Isi	1
	Relevan	1
Imparsialitas	Akses Proporsional	1
	Non-Evaluatif	1
	Non-Sensasional	1

Pada berita keempatbelas ini, peneliti menemukan bahwa dari 7 indikator yang diteliti berhasil memenuhi seluruh indikator objektivitas yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan penjabaran dari pemberitaan “Habis Banjir Terbitlah Petisi Tutup Tambang di Bengkulu” dapat dikatakan bahwa tingkat objektivitas berita tersebut adalah sangat Objektif. Berikut sajian data dengan menggunakan tabel frekuensi dibawah ini:

Tabel 5.37
Tabel Frekuensi Berita Keempatbelas
“Habis Banjir Terbitlah Petisi Tutup Tambang di Bengkulu”

Hasil Penelitian	N	Persentase (%)
Indikator Terpenuhi	7	100%
Indikator tidak terpenuhi	0	0%
Jumlah	7	100%

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15. Berita dengan judul “Berelasi Bisnis Batubara, Koalisi Desak Bawaslu Ungkap Dana Kampanye Capres-Cawapres”

Tabel 5.38
Tabel Data Berita Kelimabelas

“Berelasi Bisnis Batubara, Koalisi Desak Bawaslu Ungkap Dana Kampanye Capres-Cawapres”

Dimensi	Indikator	Penilaian
Faktualitas	Faktualitas	1
	Akurasi	1
	Kelengkapan Isi	1
	Relevan	1
Imparsialitas	Akses Proporsional	1
	Non-Evaluatif	1
	Non-Sensasional	1

Pada berita ketujuhbelas ini, peneliti menemukan bahwa dari 7 indikator yang diteliti berhasil memenuhi seluruh indikator objektivitas yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan penjabaran dari pemberitaan “Berelasi Bisnis Batubara, Koalisi Desak Bawaslu Ungkap Dana Kampanye Capres-Cawapres” dapat dikatakan bahwa tingkat objektivitas berita tersebut adalah sangat Objektif. Berikut sajian data dengan menggunakan tabel frekuensi dibawah ini:

Tabel 5.39
Tabel Frekuensi Berita Kelimabelas

“Berelasi Bisnis Batubara, Koalisi Desak Bawaslu Ungkap Dana Kampanye Capres-Cawapres”

Hasil Penelitian	N	Persentase (%)
Indikator Terpenuhi	7	100%
Indikator tidak terpenuhi	0	0%
Jumlah	7	100%

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16. Berita dengan judul “Dilarang Jalan Darat, Sungai Musi Terancam Angkutan Batubara?”

Tabel 5.40
Tabel Data Berita Keenambelas
“Dilarang Jalan Darat, Sungai Musi Terancam Angkutan Batubara?”

Dimensi	Indikator	Penilaian
Faktualitas	Faktualitas	1
	Akurasi	1
	Kelengkapan Isi	1
	Relevan	1
Imparsialitas	Akses Proporsional	1
	Non-Evaluatif	1
	Non-Sensasional	1

Pada berita keenambelas ini, peneliti menemukan bahwa dari 7 indikator yang diteliti berhasil memenuhi seluruh indikator objektivitas yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan penjabaran dari pemberitaan “Dilarang Jalan Darat, Sungai Musi Terancam Angkutan Batubara?” dapat dikatakan bahwa tingkat objektivitas berita tersebut adalah sangat Objektif. Berikut sajian data dengan menggunakan tabel frekuensi dibawah ini:

Tabel 5.41
Tabel Frekuensi Berita Keenambelas
“Dilarang Jalan Darat, Sungai Musi Terancam Angkutan Batubara?”

Hasil Penelitian	N	Persentase (%)
Indikator Terpenuhi	7	100%
Indikator tidak terpenuhi	0	0%
Jumlah	7	100%

17. Berita dengan judul “Pemerintah Aceh Diminta Lindungi Hutan dari Aktivitas Pertambangan”

Tabel 5.42
Tabel Data Berita Ketujuhbelas
“Pemerintah Aceh Diminta Lindungi Hutan dari Aktivitas Pertambangan”

Dimensi	Indikator	Penilaian
Faktualitas	Faktualitas	1
	Akurasi	1
	Kelengkapan Isi	1
	Relevan	1
Imparsialitas	Akses Proporsional	1
	Non-Evaluatif	1
	Non-Sensasional	1

Pada berita ketujuhbelas ini, peneliti menemukan bahwa dari 7 indikator yang diteliti berhasil memenuhi seluruh indikator objektivitas yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan penjabaran dari pemberitaan “Pemerintah Aceh Diminta Lindungi Hutan dari Aktivitas Pertambangan” dapat dikatakan bahwa tingkat objektivitas berita tersebut adalah sangat Objektif. Berikut sajian data dengan menggunakan tabel frekuensi dibawah ini:

Tabel 5.43
Tabel Frekuensi Berita Ketujuhbelas
“Pemerintah Aceh Diminta Lindungi Hutan dari Aktivitas Pertambangan”

Hasil Penelitian	N	Persentase (%)
Indikator Terpenuhi	7	100%
Indikator tidak terpenuhi	0	0%
Jumlah	7	100%

18. Berita dengan judul “Kajian Ini Ungkap Energi Bersih Lebih Hemat daripada PLTU”.

Tabel 5.44

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel Data Berita Kedelapanbelas**“Kajian Ini Ungkap Energi Bersih Lebih Hemat daripada PLTU”**

Dimensi	Indikator	Penilaian
Faktualitas	Faktualitas	1
	Akurasi	1
	Kelengkapan Isi	1
	Relevan	1
Imparsialitas	Akses Proporsional	1
	Non-Evaluatif	1
	Non-Sensasional	1

Pada berita kedelapanbelas ini, peneliti menemukan bahwa dari 7 indikator yang diteliti berhasil memenuhi seluruh indikator objektivitas yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan penjabaran dari pemberitaan “Kajian Ini Ungkap Energi Bersih Lebih Hemat daripada PLTU” dapat dikatakan bahwa tingkat objektivitas berita tersebut adalah sangat Objektif. Berikut sajian data dengan menggunakan tabel frekuensi dibawah ini:

Tabel 5.45**Tabel Frekuensi Berita Kedelapanbelas****“Kajian Ini Ungkap Energi Bersih Lebih Hemat daripada PLTU”**

Hasil Penelitian	N	Persentase (%)
Indikator Terpenuhi	7	100%
Indikator tidak terpenuhi	0	0%
Jumlah	7	100%

19. Berita dengan judul “Sexy Killers : Masyarakat Sebagai Anak Tiri Pertambangan? [2]”.

Tabel 5.46**Tabel Data Berita Kesembilanbelas****“Sexy Killers : Masyarakat Sebagai Anak Tiri Pertambangan? [2]”**

Dimensi	Indikator	Penilaian
---------	-----------	-----------

Faktualitas	Faktualitas	1
	Akurasi	1
	Kelengkapan Isi	1
	Relevan	1
Imparsialitas	Akses Proporsional	1
	Non-Evaluatif	1
	Non-Sensasional	1

Pada berita kesembilanbelas ini, peneliti menemukan bahwa dari 7 indikator yang diteliti berhasil memenuhi seluruh indikator objektivitas yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan penjabaran dari pemberitaan “Sexy Killers : Masyarakat Sebagai Anak Tiri Pertambangan? [2]” dapat dikatakan bahwa tingkat objektivitas berita tersebut adalah sangat Objektif. Berikut sajian data dengan menggunakan tabel frekuensi dibawah ini:

Tabel 5.47
Tabel Frekuensi Berita Kesembilanbelas
“Sexy Killers : Masyarakat Sebagai Anak Tiri Pertambangan? [2]”

Hasil Penelitian	N	Persentase (%)
Indikator Terpenuhi	7	100%
Indikator tidak terpenuhi	0	0%
Jumlah	7	100%

20. Berita dengan judul “Sexy Killer, Ketika Industri Batubara Hancurkan Lingkungan dan Ruang Hidup Warga”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Und

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 5.48
Tabel Data Berita Keduapuluh
“Sexy Killer, Ketika Industri Batubara Hancurkan Lingkungan dan Ruang Hidup Warga”

Dimensi	Indikator	Penilaian
Faktualitas	Faktualitas	1
	Akurasi	0
	Kelengkapan Isi	1
	Relevan	1
Imparsialitas	Akses Proporsional	0
	Non-Evaluatif	1
	Non-Sensasional	1

Dada berita keduapuluh ini, peneliti menemukan bahwa dari 7 indikator yang diteliti, 2 diantaranya tidak berhasil dipenuhi, yaitu indikator Akurasi dan Akses Proporsional.

Berdasarkan penjabaran dari pemberitaan “Sexy Killer, Ketika Industri Batubara Hancurkan Lingkungan dan Ruang Hidup Warga” dapat dikatakan bahwa tingkat objektivitas berita tersebut adalah sangat Objektif. Berikut sajian data dengan menggunakan tabel frekuensi dibawah ini:

Tabel 5.49
Tabel Frekuensi Berita Keduapuluh
“Sexy Killer, Ketika Industri Batubara Hancurkan Lingkungan dan Ruang Hidup Warga”

Hasil Penelitian	N	Persentase (%)
Indikator Terpenuhi	5	71%

Indikator tidak terpenuhi	2	29%
Jumlah	7	100%

21. Berita dengan judul “Peraturan Zonasi Pesisir Hadir untuk Pinggirkan Masyarakat Pesisir”.

Tabel 5.50
Tabel Data Berita Keduapuluhsatu
“Peraturan Zonasi Pesisir Hadir untuk Pinggirkan Masyarakat Pesisir”

Dimensi	Indikator	Penilaian
Faktualitas	Faktualitas	1
	Akurasi	1
	Kelengkapan Isi	1
	Relevan	1
Imparsialitas	Akses Proporsional	1
	Non-Evaluatif	1
	Non-Sensasional	1

Pada berita keduapuluhsatu ini, peneliti menemukan bahwa dari 7 indikator yang diteliti berhasil memenuhi seluruh indikator objektivitas yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan penjabaran dari pemberitaan “Peraturan Zonasi Pesisir Hadir untuk Pinggirkan Masyarakat Pesisir” dapat dikatakan bahwa tingkat objektivitas berita tersebut adalah sangat Objektif. Berikut sajian data dengan menggunakan tabel frekuensi dibawah ini:

Tabel 5.51
Tabel Frekuensi Berita Keduapuluhsatu

- Hak Cipta Dilindungi | Jndang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Peraturan Zonasi Pesisir Hadir untuk Pinggirkan Masyarakat Pesisir”

Hasil Penelitian	N	Persentase (%)
Indikator Terpenuhi	7	100%
Indikator tidak terpenuhi	0	0%
Jumlah	7	100%

22. Berita dengan judul “Menembus Jantung Hutan Harapan yang Terancam Jalan Tambang Batubara (Bagian 1)”

Tabel 5.52
Tabel Data Berita Keduapuluhdua
“Menembus Jantung Hutan Harapan yang Terancam Jalan Tambang Batubara (Bagian 1)”

Dimensi	Indikator	Penilaian
Faktualitas	Faktualitas	1
	Akurasi	1
	Kelengkapan Isi	1
	Relevan	1
Imparsialitas	Akses Proporsional	1
	Non-Evaluatif	1
	Non-Sensasional	1

Pada berita keduapuluhdua ini, peneliti menemukan bahwa dari 7 indikator yang diteliti berhasil memenuhi seluruh indikator objektivitas yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan penjabaran dari pemberitaan “Menembus Jantung Hutan Harapan yang Terancam Jalan Tambang Batubara (Bagian 1)” dapat dikatakan bahwa tingkat objektivitas berita tersebut adalah sangat Objektif. Berikut sajian data dengan menggunakan tabel frekuensi dibawah ini:

Tabel 5.53
Tabel Frekuensi Berita Keduapuluhdua

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Menembus Jantung Hutan Harapan yang Terancam Jalan Tambang Batubara (Bagian 1)”

Hasil Penelitian	N	Persentase (%)
Indikator Terpenuhi	7	100%
Indikator tidak terpenuhi	0	0%
Jumlah	7	100%

23. Berita dengan judul “Koalisi Tolak Jalan Angkut Batubara Lewati Hutan Harapan (Bagian 2)”

Tabel 5.54
Tabel Data Berita Keduapuluhtiga

“Koalisi Tolak Jalan Angkut Batubara Lewati Hutan Harapan (Bagian 2)”

Dimensi	Indikator	Penilaian
Faktualitas	Faktualitas	1
	Akurasi	1
	Kelengkapan Isi	1
	Relevan	1
Imparsialitas	Akses Proporsional	1
	Non-Evaluatif	1
	Non-Sensasional	1

Dada berita keduapuluhtiga ini, peneliti menemukan bahwa dari 7 indikator yang diteliti berhasil memenuhi seluruh indikator objektivitas yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan penjabaran dari pemberitaan “Koalisi Tolak Jalan Angkut Batubara Lewati Hutan Harapan (Bagian 2)” dapat dikatakan bahwa tingkat objektivitas berita tersebut adalah sangat Objektif. Berikut sajian data dengan menggunakan tabel frekuensi dibawah ini:

Tabel 5.55
Tabel Frekuensi Berita Keduapuluhtiga

- H
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Koalisi Tolak Jalan Angkut Batubara Lewati Hutan Harapan (Bagian 2)”

Hasil Penelitian	N	Persentase (%)
Indikator Terpenuhi	7	100%
Indikator tidak terpenuhi	0	0%
Jumlah	7	100%

24. Berita dengan judul “Pemerintah Aceh Tidak Lagi Perpanjang Moratorium Tambang, Mengapa?”

Tabel 5.56

Tabel Data Berita Keduapuluhempat

“Pemerintah Aceh Tidak Lagi Perpanjang Moratorium Tambang, Mengapa?”

Dimensi	Indikator	Penilaian
Faktualitas	Faktualitas	1
	Akurasi	1
	Kelengkapan Isi	0
	Relevan	1
Imparsialitas	Akses Proporsional	1
	Non-Evaluatif	1

- H Cipta Dilindungi Undang-Undang-Undar
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Non-Sensasional	1
--	-----------------	---

Dada berita keduapuluhempat ini, peneliti menemukan bahwa dari 7 indikator yang diteliti, 1 diantaranya tidak berhasil terpenuhi, yaitu indikator Kelengkapan Isi.

Berdasarkan penjabaran dari pemberitaan “Pemerintah Aceh Tidak Lagi Perpanjang Moratorium Tambang, Mengapa?” dapat dikatakan bahwa tingkat objektivitas berita tersebut adalah sangat Objektif. Berikut sajian data dengan menggunakan tabel frekuensi dibawah ini:

Tabel 5.57
Tabel Frekuensi Berita Keduapuluhempat
“Pemerintah Aceh Tidak Lagi Perpanjang Moratorium Tambang, Mengapa?”

Hasil Penelitian	N	Persentase (%)
Indikator Terpenuhi	6	86%
Indikator tidak terpenuhi	1	14%
Jumlah	7	100%

25. Berita dengan judul “Belt and Road Initiative, Walhi: Syarat RI jangan hanya Bagus di Kertas”

Tabel 5.58
Tabel Data Berita Keduapuluhlima
“Belt and Road Initiative, Walhi: Syarat RI jangan hanya Bagus di Kertas”

Dimensi	Indikator	Penilaian
Faktualitas	Faktualitas	1
	Akurasi	1
	Kelengkapan Isi	1
	Relevan	1
Imparsialitas	Akses Proporsional	1
	Non-Evaluatif	1
	Non-Sensasional	1

Pada berita keduapuluhlima ini, peneliti menemukan bahwa dari 7 indikator yang diteliti berhasil memenuhi seluruh indikator objektivitas yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan penjabaran dari pemberitaan “Belt and Road Initiative, Walhi: Syarat RI jangan hanya Bagus di Kertas” dapat dikatakan bahwa tingkat objektivitas berita tersebut adalah sangat Objektif. Berikut sajian data dengan menggunakan tabel frekuensi dibawah ini:

Tabel 5.59
Tabel Frekuensi Berita Keduapuluhlima
“Belt and Road Initiative, Walhi: Syarat RI jangan hanya Bagus di Kertas”

Hasil Penelitian	N	Persentase (%)
Indikator Terpenuhi	7	100%
Indikator tidak terpenuhi	0	0%
Jumlah	7	100%

26. Berita dengan judul “Bongkar Muat Batubara PLTU Pangkalan Susu Potensi Cemari Laut, Berikut Foto dan Video”.

Tabel 5.60
Tabel Data Berita Keduapuluhenam
“Bongkar Muat Batubara PLTU Pangkalan Susu Potensi Cemari Laut, Berikut Foto dan Video”

Dimensi	Indikator	Penilaian
Faktualitas	Faktualitas	1
	Akurasi	1
	Kelengkapan Isi	1

- Hak Cipta Dili
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Relevan	1
Imparsialitas	Akses Proporsional	1
	Non-Evaluatif	1
	Non-Sensasional	1

Pada berita ketduauluhenam ini, peneliti menemukan bahwa dari 7 indikator yang diteliti berhasil memenuhi seluruh indikator objektivitas yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan penjabaran dari pemberitaan “Bongkar Muat Batubara PLTU Pangkalan Susu Potensi Cemari Laut, Berikut Foto dan Video” dapat dikatakan bahwa tingkat objektivitas berita tersebut adalah sangat Objektif. Berikut sajian data dengan menggunakan tabel frekuensi dibawah ini:

Tabel 5.61
Tabel Frekuensi Berita Keduapuluhenam

“Bongkar Muat Batubara PLTU Pangkalan Susu Potensi Cemari Laut, Berikut Foto dan Video”

Hasil Penelitian	N	Persentase (%)
Indikator Terpenuhi	7	100%
Indikator tidak terpenuhi	0	0%
Jumlah	7	100%

27. Berita dengan judul “Kartu Pos dari Sumatera Tantang para Capres serius Kembangkan Energi Terbarukan”

Tabel 5.62
Tabel Data Berita Keduapuluhtujuh

Kartu Pos dari Sumatera Tantang para Capres serius Kembangkan Energi Terbarukan”

Dimensi	Indikator	Penilaian
Faktualitas	Faktualitas	1
	Akurasi	1
	Kelengkapan Isi	0

	Relevan	1
Imparsialitas	Akses Proporsional	1
	Non-Evaluatif	1
	Non-Sensasional	1

Pada berita keduapuluhtujuh ini, peneliti menemukan bahwa dari 7 indikator yang diteliti, 1 diantaranya tidak berhasil dipenuhi, yaitu indikator kelengkapan isi.

Berdasarkan penjabaran dari pemberitaan “Kartu Pos dari Sumatera Tantang para Capres serius Kembangkan Energi Terbarukan” dapat dikatakan bahwa tingkat objektivitas berita tersebut adalah sangat Objektif. Berikut sajian data dengan menggunakan tabel frekuensi dibawah ini:

Tabel 5.63
Tabel Frekuensi Berita Keduapuluhtujuh
“Kartu Pos dari Sumatera Tantang para Capres serius Kembangkan Energi Terbarukan”

Hasil Penelitian	N	Persentase (%)
Indikator Terpenuhi	6	86%
Indikator tidak terpenuhi	1	14%
Jumlah	7	100%

28. Berita dengan judul “Kajian Sebut lahan Ibukota Negara Banyak di Konsesi, Untungkan Siapa?

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 5.64
Tabel Data Berita Keduapuluhdelapan
"Kajian Sebut lahan Ibukota Negara Banyak di Konsesi, Untungkan Siapa?"

Dimensi	Indikator	Penilaian
Faktualitas	Faktualitas	1
	Akurasi	1
	Kelengkapan Isi	1
	Relevan	1
Imparsialitas	Akses Proporsional	1
	Non-Evaluatif	1
	Non-Sensasional	1

Pada berita keduapuluhdelapan ini, peneliti menemukan bahwa dari 7 indikator yang diteliti berhasil memenuhi seluruh indikator objektivitas yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan penjabaran dari pemberitaan "Kajian Sebut lahan Ibukota Negara Banyak di Konsesi, Untungkan Siapa?" dapat dikatakan bahwa tingkat objektivitas berita tersebut adalah sangat Objektif. Berikut sajian data dengan menggunakan tabel frekuensi dibawah ini:

Tabel 5.65
Tabel Frekuensi Berita Keduapuluhdelapan
"Kajian Sebut lahan Ibukota Negara Banyak di Konsesi, Untungkan Siapa?"

Hasil Penelitian	N	Persentase (%)
Indikator Terpenuhi	7	100%
Indikator tidak terpenuhi	0	0%
Jumlah	7	100%

29. Berita dengan judul "Renggut Nyawa Lagi, Sudah 35 Korban Di Lubang Tambang Batubara"

Tabel 5.66
Tabel Data Berita Keduapuluhsembilan
“Renggut Nyawa Lagi, Sudah 35 Korban Di Lubang Tanmbang Batubara”

Dimensi	Indikator	Penilaian
Faktualitas	Faktualitas	1
	Akurasi	1
	Kelengkapan Isi	1
	Relevan	1
Imparsialitas	Akses Proporsional	1
	Non-Evaluatif	1
	Non-Sensasional	0

Pada berita keduapuluhsembilan ini, peneliti menemukan bahwa dari 7 indikator yang diteliti, 1 diantaranya tidak berhasil dipenuhi, yaitu indikator Non-Sensasional.

Berdasarkan penjabaran dari pemberitaan “Renggut Nyawa Lagi, Sudah 35 Korban Di Lubang Tanmbang Batubara” dapat dikatakan bahwa tingkat objektivitas berita tersebut adalah sangat Objektif. Berikut sajian data dengan menggunakan tabel frekuensi dibawah ini:

Tabel 5.67
Tabel Frekuensi Berita Keduapuluhsembilan
“Renggut Nyawa Lagi, Sudah 35 Korban Di Lubang Tanmbang Batubara”

Hasil Penelitian	N	Persentase (%)
Indikator Terpenuhi	6	86%
Indikator tidak terpenuhi	1	14%
Jumlah	7	100%

30. Berita dengan judul “Gubernur Sultra Cabut 9 Izin Tambang di Wawonii, Bekukan 6 Lainnya”

Tabel 5.68
Tabel Data Berita Ketigapuluh

“Gubernur Sultra Cabut 9 Izin Tambang di Wawonii, Bekukan 6 Lainnya”

Dimensi	Indikator	Penilaian
Faktualitas	Faktualitas	1
	Akurasi	1
	Kelengkapan Isi	0
	Relevan	1
Imparsialitas	Akses Proporsional	1
	Non-Evaluatif	1
	Non-Sensasional	1

Pada berita ketigapuluh ini, peneliti menemukan bahwa dari 7 indikator yang diteliti, 1 diantaranya tidak berhasil dipenuhi, yaitu indikator Kelengkapan Isi

Berdasarkan penjabaran dari pemberitaan “Gubernur Sultra Cabut 9 Izin Tambang di Wawonii, Bekukan 6 Lainnya” dapat dikatakan bahwa tingkat objektivitas berita tersebut adalah sangat Objektif. Berikut sajian data dengan menggunakan tabel frekuensi dibawah ini:

Tabel 5.69
Tabel Frekuensi Berita Ketigapuluh
“Gubernur Sultra Cabut 9 Izin Tambang di Wawonii, Bekukan 6 Lainnya”

Hasil Penelitian	N	Persentase (%)
Indikator Terpenuhi	6	86%
Indikator tidak terpenuhi	1	14%
Jumlah	7	100%

31. Berita dengan judul “Demo Tuntut Pemerintah Sultra Cabut Izin Tambang di Wawonii, Warga Alami Kekerasan Aparat”

Tabel 5.70
Tabel Data Berita Ketigapuluhsatu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

“Demo Tuntut Pemerintah Sultra Cabut Izin Tambang di Wawonii, Warga Alami Kekerasan Aparat”

Dimensi	Indikator	Penilaian
Faktualitas	Faktualitas	1
	Akurasi	1
	Kelengkapan Isi	1
	Relevan	1
Imparsialitas	Akses Proporsional	1
	Non-Evaluatif	1
	Non-Sensasional	1

Pada berita ketigapuluhsatu ini, peneliti menemukan bahwa dari 7 indikator yang diteliti berhasil memenuhi seluruh indikator objektivitas yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan penjabaran dari pemberitaan “Demo Tuntut Pemerintah Sultra Cabut Izin Tambang di Wawonii, Warga Alami Kekerasan Aparat” dapat dikatakan bahwa tingkat objektivitas berita tersebut adalah sangat Objektif. Berikut sajian data dengan menggunakan tabel frekuensi dibawah ini:

Tabel 5.71
Tabel Frekuensi Berita Ketigapuluhsatu

“Demo Tuntut Pemerintah Sultra Cabut Izin Tambang di Wawonii, Warga Alami Kekerasan Aparat”

Hasil Penelitian	N	Persentase (%)
Indikator Terpenuhi	7	100%
Indikator tidak terpenuhi	0	0%
Jumlah	7	100%

32. Berita dengan judul “Cerita Warga Menanti Wawonii Terbebas dari Pertambangan”

Tabel 5.72
Tabel Data Berita Ketigapuluhsatu

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Cerita Warga Menanti Wawonii Terbebas dari Pertambangan”

Dimensi	Indikator	Penilaian
Faktualitas	Faktualitas	1
	Akurasi	1
	Kelengkapan Isi	0
	Relevan	1
Imparsialitas	Akses Proporsional	1
	Non-Evaluatif	1
	Non-Sensasional	1

Pada berita ketigapuluhdua ini, peneliti menemukan bahwa dari 7 indikator yang diteliti, 1 diantaranya tidak berhasil dipenuhi, yaitu indikator Kelengkapan Isi.

Berdasarkan penjabaran dari pemberitaan “Cerita Warga Menanti Wawonii Terbebas dari Pertambangan” dapat dikatakan bahwa tingkat objektivitas berita tersebut adalah sangat Objektif. Berikut sajian data dengan menggunakan tabel frekuensi dibawah ini:

Tabel 5.73
Tabel Frekuensi Berita Ketigapuluhdua
“Cerita Warga Menanti Wawonii Terbebas dari Pertambangan”

Hasil Penelitian	N	Persentase (%)
Indikator Terpenuhi	6	86%
Indikator tidak terpenuhi	1	14%
Jumlah	7	100%

33. Berita dengan judul “Soal Moratorium Tambang, Gubernur NTT Ditagih Janji Utamakan Pariwisata dan Pertanian”.

Tabel 5.74
Tabel Data Berita Ketigapuluhdua
“Soal Moratorium Tambang, Gubernur NTT Ditagih Janji Utamakan Pariwisata dan Pertanian”

Dimensi	Indikator	Penilaian
---------	-----------	-----------

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Faktualitas	Faktualitas	1
	Akurasi	1
	Kelengkapan Isi	1
	Relevan	1
Imparsialitas	Akses Proporsional	1
	Non-Evaluatif	1
	Non-Sensasional	1

Pada berita ketigapuluhtiga ini, peneliti menemukan bahwa dari 7 indikator yang diteliti berhasil memenuhi seluruh indikator objektivitas yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan penjabaran dari pemberitaan “Soal Moratorium Tambang, Gubernur NTT Ditagih Janji Utamakan Pariwisata dan Pertanian” dapat dikatakan bahwa tingkat objektivitas berita tersebut adalah sangat Objektif. Berikut sajian data dengan menggunakan tabel frekuensi dibawah ini:

Tabel 5.75
Tabel Frekuensi Berita Ketigapuluhtiga
“Soal Moratorium Tambang, Gubernur NTT Ditagih Janji Utamakan Pariwisata dan Pertanian”

Hasil Penelitian	N	Persentase (%)
Indikator Terpenuhi	7	100%
Indikator tidak terpenuhi	0	0%
Jumlah	7	100%

34. Berita dengan judul “Politik dan Mereka yang Terabaikan”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 5.76
Tabel Data Berita Ketigapuluhempat
“Politik dan Mereka yang Terabaikan”

Dimensi	Indikator	Penilaian
Faktualitas	Faktualitas	1
	Akurasi	0
	Kelengkapan Isi	0
	Relevan	1
Imparsialitas	Akses Proporsional	0
	Non-Evaluatif	0
	Non-Sensasional	1

Dada berita ketigapuluhempat ini, peneliti menemukan bahwa dari 7 indikator yang diteliti, 4 diantaranya tidak berhasil dipenuhi, yaitu indikator Akurasi, Kelengkapan Isi, Akses Proporsional, dan Non-Evaluatif.

Berdasarkan penjabaran dari pemberitaan “Politik dan Mereka yang Terabaikan” dapat dikatakan bahwa tingkat objektivitas berita tersebut adalah cukup Objektif. Berikut sajian data dengan menggunakan tabel frekuensi dibawah ini:

Tabel 5.77
Tabel Frekuensi Berita Ketigapuluhempat
“Politik dan Mereka yang Terabaikan”

Hasil Penelitian	N	Persentase (%)
Indikator Terpenuhi	3	42.8%
Indikator tidak terpenuhi	4	57.2%

Jumlah	7	100%
--------	---	------

5. Berita dengan judul “Tambang Batubara Ini Ancam Hutan Desa dan Dekat Suaka Rimbang Baling”

Tabel 5.78
Tabel Data Berita Ketigapuluhlima

“Tambang Batubara Ini Ancam Hutan Desa dan Dekat Suaka Rimbang Baling”

Dimensi	Indikator	Penilaian
Faktualitas	Faktualitas	1
	Akurasi	1
	Kelengkapan Isi	1
	Relevan	1
Imparsialitas	Akses Proporsional	1
	Non-Evaluatif	1
	Non-Sensasional	1

Pada berita ketigapuluhlima ini, peneliti menemukan bahwa dari 7 indikator yang diteliti berhasil memenuhi seluruh indikator objektivitas yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan penjabaran dari pemberitaan “Tambang Batubara Ini Ancam Hutan Desa dan Dekat Suaka Rimbang Baling” dapat dikatakan bahwa tingkat objektivitas berita tersebut adalah sangat Objektif. Berikut sajian data dengan menggunakan tabel frekuensi dibawah ini:

Tabel 5.79
Tabel Frekuensi Berita Ketigapuluhlima

“Tambang Batubara Ini Ancam Hutan Desa dan Dekat Suaka Rimbang Baling”

Hasil Penelitian	N	Persentase (%)
Indikator Terpenuhi	7	100%
Indikator tidak terpenuhi	0	0%
Jumlah	7	100%

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Berita dengan judul “Organisasi Lingkungan Desak Jepang Setop Biayai Energi Batubara”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tabel 5.80
Tabel Data Berita Ketigapuluhenam
“Organisasi Lingkungan Desak Jepang Setop Biayai Energi Batubara”

Dimensi	Indikator	Penilaian
Faktualitas	Faktualitas	1
	Akurasi	1
	Kelengkapan Isi	1
	Relevan	1
Imparsialitas	Akses Proporsional	1
	Non-Evaluatif	1
	Non-Sensasional	1

Pada berita ketigapuluhenam ini, peneliti menemukan bahwa dari 7 indikator yang diteliti berhasil memenuhi seluruh indikator objektivitas yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan penjabaran dari pemberitaan “Organisasi Lingkungan Desak Jepang Setop Biayai Energi Batubara” dapat dikatakan bahwa tingkat objektivitas berita tersebut adalah sangat Objektif. Berikut sajian data dengan menggunakan tabel frekuensi dibawah ini:

Tabel 5.81
Tabel Frekuensi Berita Ketigapuluhenam
“Organisasi Lingkungan Desak Jepang Setop Biayai Energi Batubara”

Hasil Penelitian	N	Persentase (%)
Indikator Terpenuhi	7	100%
Indikator tidak terpenuhi	0	0%
Jumlah	7	100%

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Pembahasan

Tabel 5.82
Tabel Rekapitulasi Hasil Penelitian

Hasil Penelitian	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	Persentase %
Faktualitas	36	0	100%
Akurasi	34	2	94%
Keengkapan Isi	29	7	80,56%
Relevansi	36	0	100%
Akses Proporsional	33	3	91.67%
Non Evaluatif	34	2	94%
Non Sensasional	35	1	97%

Berdasarkan konsep objektivitas media dari Westerthal yang membagi objektivitas dengan dua dimensi yaitu dimensi faktualitas dan dimensi imparzialità, dalam penelitian ini dipecah hingga menjadi 7 indikator yaitu Faktualitas, Akurasi, Kelengkapan Isi, Relevansi, Akses Proporsional, non-evaluatif serta Non-sensasional. Maka diperoleh hasil penelitian "Objektivitas Pemberitaan Tambang Batubara di Media Online Mongabay.co.id" ditemukan bahwa 93.89% berita tersebut objektif, artinya tingkat objektivitas pada pemberitaan tersebut sangat tinggi.

Berkenaan dengan pelaksanaan etika komunikasi massa ini, menurut Nurudin, etika adalah pedoman baik tidaknya sebuah proses pelaksanaan komunikasi massa. Sebagai sebuah pedoman, tidak tertutup kemungkinan terjadinya pelanggaran. Ketika orang mengatakan bahwa kita harus berpegang pada etika, saat itulah sebenarnya ada bukti proses pelanggaran etika.

Banyak hal yang menjadi penyebab suatu media massa bias menyalahi etika komunikasi massa yang sudah disepakati, baik dalam peraturan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), maupun yang tercantum dalam Undang-Undang Pers No. 40/1999 sehingga menghilangkan standar jurnalistik yang bersifat universal adalah berita harus objektif (dalam arti apa adanya).¹

1. Faktualitas

Faktualitas dilihat dengan pemisahan fakta dari opini, komentar, interpretasi pada suatu berita. Faktualitas terbagi dari dua yaitu fakta sosiologis dan fakta psikologis.

Faktualitas terbagi menjadi dua, yaitu fakta sosiologis dan fakta psikologis. Fakta sosiologis adalah berita yang bahan bakunya berupa peristiwa atau kejadian yang nyata. Sedangkan fakta psikologis adalah berita yang bahan bakunya adalah interpretasi subjektif (pernyataan atau opini) terhadap suatu kejadian atau gagasan.²

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan data yang memenuhi aspek faktualitas adalah 36 berita (100%), artinya, disini peneliti menemukan semua berita terpenuhi tingkat faktualitasnya. Hal ini menunjukkan tingkat faktualitas berita pada penelitian "Objektivitas Pemberitaan Tambang Batubara di Media Online Mongabay.co.id" sangat tinggi.

¹ Sirkit Syah, *RAMBU-RAMBU JURNALISTIK dari Undang-Undang hingga Hati Nurani*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h 4

² Nurudin, *Op.Cit*, h 76

Orientasi berita yang didasarkan atas kebenaran harus menjadi pegangan pokok setiap wartawan, bukan opini atau interpretasi wartawan sendiri.

2. Akurasi

Akurasi merupakan aspek penting dalam jurnalisme. Akurasi berarti akurat yang berkaitan dengan verifikasi terhadap fakta, relevansi sumber berita dan akurasi penyajian. Artinya akurasi adalah kemampuan suatu berita untuk dapat dikonfirmasi dengan sumber berita yang ada pada berita tersebut sehingga dapat teruji kebenaran dan ketepatan faktanya.³

Cek dan ricek adalah melakukan verifikasi kembali pada sumber berita. Sumber berita adalah siapa saja yang dinilai mempunyai posisi mengetahui atau berkompeten terhadap suatu fakta, peristiwa, atau kejadian, gagasan, serta data atau informasi yang bernilai berita.⁴ Berita yang dapat dikonfirmasi adalah berita yang tidak dibuat sekadarnya, namun berdasarkan hasil wawancara dari narasumber terpercaya yang bias dikonfirmasi kebenarannya sehingga hal tersebut akan menambah suatu kualitas berita.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan data yang memenuhi aspek akurasi adalah 34 berita (94%), sedangkan 2 berita (6%) tidak memenuhi syarat dari 36 berita (100%) yang menjadi sampel penelitian. Hal ini menunjukkan tingkat akurasi berita pada penelitian “Objektifitas Pemberitaan Tambang Batubara di Media Online Mongabay.co.id” sangat tinggi.

3. Kelengkapan Isi

Lengkap berarti semua fakta dan peristiwa telah diberitakan seluruhnya, berita dikatakan lengkap apabila isi berita memenuhi semua unsur 5W+1H (*what, where, who, when, why, dan how*) tanpa terkecuali dalam penulisannya. *What* berkenaan dengan peristiwa apa yang terjadi. *Who* berkenaan dengan siapa saja pelaku yang terdapat dalam pemberitaan. *When* berkaitan dengan kapan peristiwa atau kejadian terjadi. *Where* berkenaan dengan tempat atau peristiwa yang terjadi dalam berita. *Why* berkaitan dengan penyebab peristiwa terjadi. Dan *How* berkenaan dengan bagaimana peristiwa atau kejadian itu dapat terjadi. Suatu berita harus memenuhi syarat 5W+1H

³ Rachmat Kriyantono, Loc. Cit, h 244

⁴ Setia Wiling Barus, *JURNALISTIK Petunjuk Teknis Menulis Berita*, (Jakarta: Erlangga, 2010), h 54

yang merupakan pondasi dasar baik dalam pencarian fakta maupun dalam penyajiannya.⁵

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan data yang memenuhi aspek kelengkapan isi adalah 29 berita (75), sedangkan 7 berita (25%) tidak memenuhi syarat dari 36 berita (100%) yang menjadi sampel penelitian. Hal ini menunjukkan tingkat kelengkapan isi berita pada penelitian “Objektifitas Pemberitaan Tambang Batubara di Media Online Mongabay.co.id” tinggi.

4. Relevansi

Berita yang relevan adalah berita yang mengandung nilai-nilai berita yang terkandung didalamnya sehingga berita tersebut bisa dikatakan relevan.⁶ Adapun unsur-unsur nilai berita tersebut adalah *pertama*, aktualitas (*timeliness*). Bagi sebuah surat kabar, semakin actual berita-beritanya, artinya semakin baru peristiwanya terjadi, semakin tinggi nilai beritanya. *Kedua*, kedekatan (*Proximity*). Peristiwa yang mengandung unsur kedekatan dengan pembaca, akan lebih menarik. *Ketiga*, keterkenalan (*prominence*). Keterkenalan dapat diakaitkan dengan nama-nama tokoh berpengaruh yang diberitakan sehingga menarik perhatian pembaca, keterkenalan ini tidak harus diartikan orang saja. Namun nama tempat, tanggal, situasi, dan peristiwa-peristiwa terkenal juga memiliki nilai berita yang tinggi. *Keempat*, besaran (*magnitude*). Suatu peristiwa haruslah menyangkut angka-angka yang berarti bagi kehidupan orang banyak atau akibat dari kejadian yang bisa dijumlahkan hingga menarik bagi penonton. *Kelima* kepentingan (*significance*) adalah berita yang mungkin akan memberi pengaruh pada kehidupan orang banyak atau kejadian yang memiliki akibat terhadap kehidupan penonton.⁷

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan berita yang memenuhi aspek relevansi adalah 36 (100%) berita, artinya semua berita memenuhi tingkat indikator relevansi yang menjadi sampel penelitian. Hal ini menunjukkan tingkat relevansi berita pada penelitian “Objektifitas Pemberitaan Tambang Batubara di Media Online Mongabay.co.id” sangat tinggi.

5. Akses Proporsional

⁵ Ibid, h36

⁶ Rachmat Kriyantono, Loc. Cit h 244

⁷ Hikmah Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, Op. Cit, h 61-64

Berita yang berimbang adalah berita yang menampilkan semua sisi, tidak menghilangkan dan menyeleksi sisi tertentu untuk diberitakan.⁸ Keberimbangan menjadi sangat penting manakala berita yang diangkat memiliki pengaruh besar bagi masyarakat. Keberimbangan adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.

Ketidakberpihakan dilihat dari sumber berita yang digunakan yaitu: seimbang yaitu bila masing-masing pihak diberikan porsi yang sama sebagai sumber berita, dilihat dari jumlah sumber beritanya, tidak seimbang yaitu bila masing-masing pihak yang diberitakan tidak diberi porsi yang sama sebagai sumber berita, dilihat dari jumlah sumber beritanya.⁹

Jika suatu menitikberatkan kesalahan atau memberikan dukungan yang berlebihan kepada salah satu pihak yang diberitakan, hal ini memberikan pengaruh besar bagi masyarakat dalam menentukan karakter tokoh yang diberitakan.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan berita yang memenuhi aspek akses proporsional adalah 33 (91.67%) berita, sedangkan 3 (8.33%) berita tidak memenuhi syarat dari 38 (100%) berita yang menjadi sampel penelitian. Hal ini menunjukkan tingkat akses proporsional berita pada penelitian "Objektifitas Pemberitaan Tambang Batubara di Media Online Mongabay.co.id" sangat tinggi. Sangat objektif.

6. Non-Evaluatif

Non-Evaluatif yaitu berita tidak memberikan penilaian atau *judgment*.¹⁰ Ini berarti tidak adanya pencampuran fakta dan opini seorang wartawan pada sebuah berita, yaitu jika dalam tulisan berita tersebut tidak terdapat kata-kata *opinionative* seperti: tampaknya, diperkirakan, seolah, agaknya, seakan-akan, seharusnya, terkesan, kesannya, diramalkan, agaknya, sayangnya, kontroversi, mengejutkan, maneuver, dan lainnya.¹¹ Kecenderungan melakukan pencampuran antara fakta dan opini oleh seorang wartawan dapat menimbulkan rendahnya tingkat objektivitas suatu berita.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan berita yang memenuhi aspek non-evaluatif adalah 34 (94%) berita, sedangkan 2 (6%) berita tidak memenuhi syarat dari 36 (100%) berita yang menjadi sampel penelitian. Hal ini menunjukkan tingkat

⁸ Eriyanto, Loc. Cit h 195

⁹ Rachmat Kriyantono, Op. Cit, h 249

¹⁰ Eriyanto, Loc. Cit, h 195

¹¹ Rachmat Kriyantono, Op. Cit, h 245

non-evaluatif berita pada penelitian Objektivitas Pemberitaan Tambang Batubara di Media Online Mongabay.co.id” sangat tinggi.

7. Non-Sensasional

Non-sensasional berhubungan dengan dramatisasi dalam suatu berita, maksudnya berita yang disajikan tidak menggunakan bahasa yang berlebihan atau sensasional sehingga tidak melebih-lebihkan fakta yang diberitakan.¹²

Jadi, berita dikatakan non-sensasional apabila terdapat kesesuaian judul dan isi berita, sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik versi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) tahun 1994 pasal 9 mengatakan “*wartawan Indonesia menulis judul yang mencerminkan isi berita.*”¹³

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan data yang memenuhi aspek non-sensasional adalah 35(97%) berita, sedangkan 1 (3%) berita tidak memenuhi syarat dari 36 (100%) berita. Hal ini menunjukkan tingkat non-sensasional berita pada penelitian Objektivitas Pemberitaan Tambang Batubara di Media Online Mongabay.co.id” sangat tinggi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹² Eriyanto, Loc. Cit, h 195

¹³ Sedia Willing Barus, Op. Cit, h 59